

**PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDENRENG RAPPANG**



BUSSOWA

O L E H

SURIATI RM

STB 4586020209

NIRM 871133247

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian
Sarjana Negara Jurusan Ilmu Administrasi

P A D A
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

HALAMAN PENGESAHAN

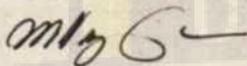
Judul Skripsi : PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG

Nama Mahasiswa : S U R I A T I

Nomor STB/NIRM. : 4586020209/871133247

Pembimbing I, Menyetujui

Pembimbing II,



Drs. M. Tayeb Tamma



Dra. H. Hamicha Thaib

Mengetahui :

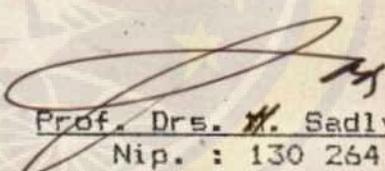


Dekan Fakultas ISIPOL
Universitas "45" Ujung
Pandang,



Drs. H. Muhammad Thala
NIP. : 130 432 985

Ketua Jurusan Administrasi
Negara FISIPOL Universitas
"45" Ujung Pandang,



Prof. Drs. H. Sadly AD. MPA
Nip. : 130 264 141

Tanggal pengesahan : 21 Pebruari 1991

"KUPERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUAKU"
Harapan dan cita-citaku terwujud dalam satu kenyataan

Pada usiaku yang masih bocah, kududuk dibangku SD aku selalu berangan-angan menyanggah gelar sarjana. Disaat kududuk di bangku SMP kedua orang tuaku berharap semoga aku dapat menuntut ilmu setinggi kemampuanku.

Tiga tahun kemudian aku melangkahhkan kaki dibangku SMA pesan dan nasehat kedua orang tuaku selalu kuingat agar aku rajin dan tekun belajar dan tabah dalam menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu agar kelak aku dapat berhasil dengan baik.

Masa kuliahku adalah perjalanan hidupku yang paling berkesan dengan suka duka yang kualami menambah semangatku untuk mencapai angan-angan harapan dan cita-citaku. Akhirnya kugapai jua harapan dan cita-citaku itu sebagai baktiku untukmu yang sangat kucintai Kedua orang tuaku".

*Banyak kejadian-kejadian
yang menyusahkan kita
Tapi janganlah kita cepat putus asa
karena disisi lain jalan keluarnya*

*Di mana ada kemauan
Di situ ada terletak pintu jalanan
Tanamkan semangat jiwa 45
untuk menjadi manusia mandiri
yang berguna bagi nuasa dan bangsa*
*Tiada hari tanpa pelajaran
tiada pekerjaan tanpa hasil
olehnya itu jalani hidup ini
di jalan benar*

"liku liku kehidupan"

S U R I A T I R M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis penjabarkan kehadiran Allah Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya jualan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sekalipun dalam wujud yang sangat sederhana. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk penyelesaian studi perogram pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Didalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan permasalahan yang dihadapi mulai dari tahap direncanakannya sampai kepada penjabaran kedalam bentuk penulisan. Oleh sebab itu kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan materi pada skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dengan selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dorongan serta petunjuk dari berbagai pihak, maka sepatutnya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terma kasih kepada :

1. Bapak Drs. Tayeb Tamma dan Ibu Dra. H. Hamicha Thaib selaku dosen pembimbing yang dengan kerelahan hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan selama penulisan sampai selesainya.

2. Bapak Drs. H. M. Thala selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. Sadly Ad, MPA selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada FISIPOL Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh civitas akademika FISIPOL Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak ketua Bappeda TK II Sidrap dan seluruh stafnya yang telah bersedia membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini didalam memberikan informasi pada penelitian.
6. Bapak Kepala Daerah TK II Sidrap dan seluruh stafnya yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi pada penelitian ini.
7. Bapak Kepala Instansi vertikal/dinas daerah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang telah memberikan data dan informasi tentang materi penelitian ini.
8. Yang yercinta ayahanda Radjani Makmur dan Ibunda Imatia yang telah bersusah payah mengasuh dan membimbing penulis dari kecil hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Kakak H. Kasnah dan H. Abdullah BM. Serta seluruh warga Veteran Selatan 139 Ujung Pandang yang

telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman dan handai tolan yang bersusah payah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya do'a Restu dari penulis semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan HinayahNya kepada kita semua, amin.

Ujung Pandang,

1991

Penulis,

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| ABSTRAKSI | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Kerangka Teori | 7 |
| E. Metodologi Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Pokok-Pokok Pengertian | 14 |
| 1. Pengertian Perencanaan | 14 |
| 2. Pengertian Pembangunan | 19 |
| 3. Pengertian Bappeda | 21 |
| B. Dasar dan Tujuan Pembangunan Daerah ... | 25 |
| 1. Dasar Pembangunan Daerah | 25 |
| 2. Tujuan Pembangunan Daerah | 27 |

| | |
|--|----------|
| 3. Bappeda Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 29 |
| BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 31 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Dati II Sidrap | 31 |
| B. Struktur organisasidan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemangunan Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang | 32 31 |
| C. Kepegawaian Bappeda TK II Sidrap | 41 |
| D. Sarana dan Fasilitas Bappeda TK II Sidrap | 47 |
| E. Biaya Operasional Bappeda TK II Sidrap | |
| BAB IV. KOORDINASI DALAM PERENCANAAN DAN PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG | 49 |
| A. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah..... | 49 |
| B. Keterlibatan Instansi Vertikal/Dinas- Dinas di Daerah dalam Perencanaan Pemangunan Daerah | 68 |
| C. Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Perencanaan pembangunan Daerah | 86 |
| D. Peranan Bappeda dalam Monitoring Pelaksanaan Pemangunan Daerah. | 90 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|-----|
| BAB | V. KESIMPULAN DAN SARAN SARAN | 109 |
| | A. Kesimpulan | 109 |
| | B. Saran - Saran | 111 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| NO. | T E K S | HALAMAN |
|-----|---|---------|
| 1. | Keadaan pegawai Bappeda TK II Sidrap sesuai jenjang pendidikannya | 40 |
| 2. | Jumlah personil Bappeda TK II Sidrap | 43 |
| 3. | Tanggapan Responden tentang tingkat partisipasi Instansi-Instansi terkait dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah | 84 |
| 4. | Tanggapan Responden tentang tingkat pelaksanaan rapat-rapat koordinasi | 85 |
| 5. | Tanggapan instansi-instansi terkait terhadap badan perencanaan pembangunan daerah dalam memonitor pelaksanaan pembangunan | 107 |

DAFTAR GAMBAR

| NO. | T E K S | HALAMAN |
|-----|---|---------|
| 1. | Struktur Organisasi Bappeda TK II Sidrap | 40 |
| 2. | Skema mekanisme perencanaan top down dan bottom up..... | 52 |
| 3. | Keterpaduan rencana pembangunan kecamatan dengan rencana pembangunan kabupaten/kotamadya, instansi vertikal kecamatan dan desa/kelurahan. | 63 |
| 4. | Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah | 64 |
| 5. | Proses penyusunan RPJMD (desa) dan RPJMK (Kecamatan) | 65 |
| 6. | Hubungan Koordinasi antara Bappeda dengan instansi vertikal./terkait..... | 83 |
| 7. | Kaitan antara masing-masing variabel yang memberdakan antara monitoring dan evaluasi | 105 |

DAFTAR LAMPIRAN

| NO. | T | E | K | S | HALAMAN |
|-----|--------|--------------|-------------|--|---|
| 1. | Daftar | pertanyaan | untuk | Bappeda | TK II Sidrap.... |
| 2. | Daftar | pertanyaan | untuk | Bupati Kepala Daerah | TK II Sidenreng rappang..... |
| 3. | Daftar | pertanyaan | untuk | instansi vertikal dan | Dinas-dinas daerah lainnya..... |
| 4. | Tabel | Realisasi | pengeluaran | pembangunan | dati II sidenreng Rappang tahun anggaran 1982 s/d 1988 dalam (000)..... |
| 5. | Tabel | pelaksanaan | proyek | Inpres, APBD TK I dan APBD TK II Tahun Anggaran 1989/1990 Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang..... | |
| 6. | Tabel | pelaksanaan | proyek | Inpres Bantuan Sarana kesehatan tahun 1984 s/d 1989 di Kabupaten Dati Sidenreng Rappang | |
| 7. | Tabel | pelaksanaan | proyek | Bantuan Dati I Sulawesi Selatan tahun anggaran 1984 s/d 1989 di Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang..... | |
| 8. | Tabel | Realisasi | pelaksanaan | proyek-proyek/program Inpres Pelita IV di Kabupaten Dati II Sidrap..... | |
| 9. | Tabel | pelaksanaan | proyek | inpres Bantuan penunjang jalan tahun 1984 s/d 1989 di Kabupaten Sidrap ... | |
| 10. | Tabel | perkembangan | kauengan | dan fisik | proyek-proyek pembangunan dalam kabupaten dati II Sidrap |

- pa Pelita IV
11. Daftar usulan proyek inpres tahun anggaran
1990/1991.....
12. Daftar usulan proyek inpres tahun anggaran
1989/1990.....



ABSTRAKSI

Di dalam penulisan skripsi inidikemukakan dua perumusan masalah yaitu :

1. Apakah peranan yangndijalankan oleh Bappeda Tingkat II Sidrap sesuai dengan Kepres No. 27 tahun 1980.
2. Apakah hubungan kerja antara Bappeda Tingkat II Sidrap dalam koordinasi yang baik dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya berjalan bersama.

Kemudian tujuan dari penelitian ini ada 3 macam yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Bappeda Tingkat II Sidrap dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Untuk menggambarkan hubungan kerjasama antara Bappeda Tingkat II Sidrap dalam koordinasi yang baik dengan instansi-instansi vertikal lainnya di daerah tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Sidrap.

Sedangkan kegunaan penelitaian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan gambaran secara umum bahwa Bappeda adalah salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apayang berperan serta dalam mendorong dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Sidrep dapat ditemukan dan dipecahkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan data adalah observasi dan interview.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa :

1. Perencanaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Kepres No.27 tahun 19980.
2. Hubungan kerjasama antara Bappeda dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya berjalan bersama sehingga tercipta keterpaduan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Dalam pelaksanaan koordinasi Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang ditinjau dari siklus administrasi dapat dikatakan berjalan dengan cukup efektif, minimal sebagai proses formal.

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Dati II Sidenreng Rappang ditemukan beberapa faktor yang menghambat antara lain :

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mengubah keadaan hidup masyarakat kepada keadaan yang dianggap lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga setiap pelaksanaan PELITA, baik PELITA Nasional maupun PELITA daerah selalu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan keterampilan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan. Karena perencanaan merupakan awal dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu perencanaan merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Karena itulah berdasarkan Kepres No.27 tahun 1980 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1982, maka dibentuklah suatu Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidrap yang bertugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan Daerah. Badan perencanaan Pembangunan Daerah adalah badan staf yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, dimana BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan/perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini adalah berdasarkan pada landasan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pada GBHN bab II dimana Pola Dasar Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia" 1)

Untuk itulah dibutuhkan suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar terdapat keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral. Untuk menciptakan keserasian dalam perencanaan pembangunan daerah, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dibentuklah suatu Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berdasarkan Kepres No. 27 tahun 1980.

Adapun tugas dan fungsi BAPPEDA TK II Sidrap adalah :

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah
2. Menyusun Rencana Program-Program Tahunan
3. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA)
4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan antara instansi vertikal dan dinas daerah lainnya
6. Memonitor pelaksanaan pembangunan
7. Dan lain-lain.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 5 tahun 1982 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BAPPEDA TK II Sidrap khususnya dalam koordinasi dan monitoring sudah berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan monitoring dilaksanakan setiap bulan dan triwulan. Dimana disini dievaluasi hasil pelaksanaan proyek-proyek pembangunan baik hambatan yang dialami maupun jalan pemecahannya.

Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan pembangunan di daerah tentunya memerlukan suatu sistem perencanaan yang mampu memadukan antara satu program instansi dengan program instansi lain. Agar

tidak terjadi kontradiksi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan semakin meningkatnya volume pembangunan pada berbagai sektor sehingga dituntut adanya suatu sistem administrasi pembangunan yang lebih baik serta peningkatan aparatur pengelola pembangunan di daerah. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada pengawasan. Sehingga mereka mampu mengambil prakarsa yang lebih besar dalam pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan daerah TK II Sidrap dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dalam rangka pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang mendorong penulis memilih judul ini "PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDRAP".

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran bahwa BAPPEDA Tingkat II Sidenreng Rappang sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kepres No. 27 tahun 1980.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada Kepres No.27 tahun 1980 yang merupakan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA yang diperkuat lagi dengan Perda No. 5 tahun 1982 tentang pembangunannorganisasi dan Tata Kerja BAPPEDA TK II SIDRAP No. 2 tahun 1982 seri D. No. 2.

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk mengubah keadaan hidup masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari sebelumnya diperlukan adanya perencanaan yang bersifat komfrensif.

Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam melaksanakan peranannya sebagai perencana, pelaksana dan pengendali dalam pembangunan hendaklah memperhatikan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Karena setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai potensi dan kondisi yang berbeda, sehingga kebutuhan masyarakat berbeda pula.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya seperti yang diutarakan pada Trilogi pembangunan, maka peranan BAPPEDA sebagai badan perencanaan

pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan dua arah yaitu perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (Bottom-up planning), sehingga pembangunan di daerah selaras dengan pembangunan nasional. Begitupula pembangunan daerah harus sinkron dengan pembangunan sektor dalam mencapai suatu keterpaduan dalam pembangunan, baik bersifat jangka pendek, menengah, panjang.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka secara garis besarnya perumusan masalah pada tesis ini adalah :

1. Apakah peranan yang dijalankan oleh Bappeda di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang sesuai Kepres No.27 tahun 1980.
2. Apakah hubungan kerja antara Bappeda Tingkat II Sidrap dengan Instansi vertikal dan dinas daerah lainnya dalam koordinasi yang baik, khususnya dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Permasalahan di atas akan dikaji secara berkembang sehingga menimbulkan analisa yang bermanfaat bagi aparat perencana pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang khususnya, dan umumnya perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia serta bermanfaat pada diri penelitian sendiri.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Bappeda Tingkat II Sidrap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kepres No.27 tahun 1980.
2. Untuk menggambarkan hubungan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda TK II Sidrap dengan Instansi-Instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di daerah tersebut dalam penyusunan rencana pembangunan.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah :

1. Untuk memberikan gambaran secara umum bahwa Bappeda adalah salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berperan dalam mendorong dan menghambat pelaksanaan pembangunan.
3. Untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Kantor Bappeda TK II Sidenreng Rappang.

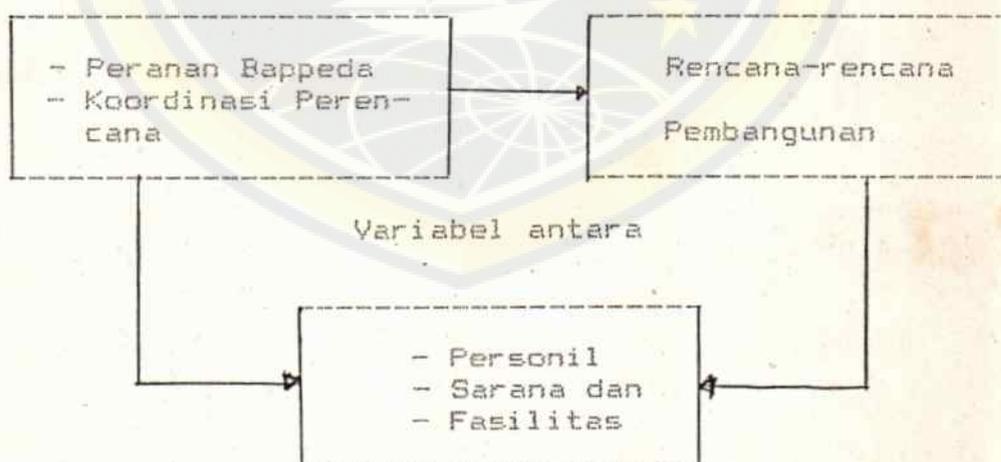
D. Kerangka Teori

Sesuai dengan masalah penelitian, maka variabel yang diteliti terdiri atas :

1. Sebagai variabel independen (variabel bebas)
 - a. Peranan Bappeda
 - b. Koordinasi dalam perencanaan
2. Sebagai variabel dependen (variabel terikat/tergantung)
 - Hasil-hasil perencanaan atau rencana-rencana pembangunan yang telah dibuat.
3. Variabel antara yaitu :
 - a. Personil/Kepegawaian
 - b. Sarana dan fasilitas.

Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel independen
Variabel dependen



Gambar 1. Hubungan variabel independen dan dependen serta variabel antara dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melengkapi gambaran dari kerangka teori ini maka penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam tesis ini. Peranan dapat diartikan tugas dan fungsi dalam suatu jabatan. Peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang penting yang dalam bahasa inggris biasa disebut role. Peranan berarti sesuatu yang memiliki pengaruh dalam mencapai sesuatu tujuan. Pengaruh disini dihubungkan dengan tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu jabatan pada suatu organisasi sesuai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Lebih jelasnya ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pengertian antara lain :

"Peranan adalah fungsi yang penting, dan fungsi itu tidak lain daripada pembagian tugas dalam rangka organisasi."

Sedangkan Suryono Sukanto SH. MA mengatakan bahwa :

"Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang". 2)

Dari kedua pengertian peranan yang penulis kemukakan di atas, meski redaksinya berbeda, akan tetapi pada dasarnya akan ada persamaan. Yaitu adanya dimiliki fungsi atau status pada orang-orang tertentu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Sehingga pada pembahasan ini pengertian peranan adalah bagaimana cara menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi didalam melakukan suatu penelitian.

Untuk mendukung obyektivitas dan kebenaran yang diungkapkan dalam penulisan karya ilmiah, memerlukan data yang cukup dan relevan dengan masalah yang diteliti. Setiap data yang diperlukan itu memiliki sifat dan sumber yang berbeda. Untuk memperolehnya memerlukan tehnik dan cara yang berbeda pula.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Deskriptif" yaitu untuk mendapatkan gambaran yang ferhat dari obyek permasalahan, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada mengenai sampel, lokasi dan pendapat serta pandangan dari responden. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. **Library research** (study kepustakaan) ialah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku buku dan literatur, peraturan-

peraturan dan Undang-Undang. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh landasan teori yang akan dipergunakan didalam pembahasan berikutnya.

2. **Field research** (penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung pada obyek yang diteliti. Tujuan penelitian lapangan yaitu agar penelitian mendapat informasi yang langsung.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang penulis pergunakan dalam mengumpulkan data yaitu :

1. **Observasi** (pengamatan) yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kenyataan yang ada dilapangan. Pengamatan yang cermat memungkinkan memperoleh fakta yang lengkap.
2. **Interview** (wawancara) yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh gambaran dan pandangan para pejabat atau orang yang berkaitan dengan masalah pembahasan skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan mempergunakan pedoman wawancara/kuesioner. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya. Dengan demikian penulis mengharapkan data dan informasi yang lengkap.

Sumber data

Data tersebut diperoleh dari berbagai instansi yaitu :

1. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidrap
2. Kantor Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang
3. Instansi vertikal/dinas yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Analisa Data

Berdasarkan pengumpulan diatas, maka diadakan analisa data secara prosentatif. Dimana membandingkan perencanaan pembangunan dengan keadaan alam dan potensi yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang. Data-data yang diperoleh kemudian diprosentasikan jawabannya.

Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis memakai tehnik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas tuntutan peneliti dan kebutuhan yang ingin dicapai. Dimana responden yang dijadikan sampel dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Adapun yang dijadikan responden adalah pejabat teras di Kantor Bappeda TK II Sidrap, Pejabat teras pada kantor Bupati Kepala Daerah TK II Sidrap, Dinas daerah dan instansi vertikal yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penentuan sampel diambil 30 orang masing-masing :

1. Pejabat teras Kantor Bupati Kepala Daerah TK II Sidrap 5 orang.
2. Pejabat teras Bappeda TK II Sidrap 5 orang.
3. Kepala-Kepala instansi vertikal 5 orang.
4. Kepala Non Departemen 3 orang.
5. Kepala-Kepala Wilayah 7 orang.
6. Kepala-Kepala dinas daerah adalah 5 orang.

Data-data yang diperoleh kemudian diprosentasikan jawabannya. Penentuan jawaban dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tiap jenis jawaban}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100 \%$$

Ketentuan penilaian adalah :

1. Jika penelitian mencapai angka 76 % ke atas, maka penilaian dianggap sangat efektif.
2. Jika penilaian mencapai angka 51 % - 75 % cukup efektif.
3. Jika penilaian mencapai 26 % - 50 %, maka penilaian akan dianggap kurang efektif.
4. Jika penilaian mencapai 25 % - kebawah, maka penilaian dianggap tidak efektif.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, kerangka teori serta sistematika pembahasan

Bab II. Mengemukakan tentang tinjauan pustaka tentang pengertian peranan, pengertian

pembangunan, pengertian pembangunan daerah dan Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah.

Bab III. Menjelaskan tentang struktur organisasi Bappeda TK II Sidrap, Gambaran Umum Kabupaten Sidrap, Kepegawaian Bappeda TK II Sidrap.

Bab IV. Pada bab ini diuraikan tentang proses perencanaan pembangunan daerah, proses koordinasi dalam. Keterlibatan Instansi vertikal/dinas daerah dalam perencanaan, peranan Bappeda dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, peranan Bappeda dalam monitoring pelaksanaan pembangunan daerah.

Bab V. Adalah bab penutup, yang merupakan bab penutup dari isi skripsi ini. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai inti pembahasan, dan saran-saran yang lainnya dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan perencana pembangunan di Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pokok Pokok Pengertian

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari management yang menyangkut kegiatan apa dan bagaimana itu dilaksanakan dengan memperhitungkan sumber-sumber yang tersedia. Perencanaan adalah suatu tehnik, alat untuk mencapai suatu tujuan sebagai pelaksanaan dari sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana pilihan tujuan tersebut dilakukan secara sadar atas dasar skala prioritas dan kebutuhan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Dibawah ini akan dikemukakan pengertian perencanaan dari berbagai ahli antara lain :

"Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia."
(Tjokroamidjojo, 1986 : 12)

Menurut Albert Waterson yang di kutip oleh Bintoro dalam bukunya "Perencanaan Pembangunan"

menyatakan bahwa :

"Perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan dari berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan." (Tjokroamidjojo, 1986 : 12)

Dengan demikian kegiatan-kegiatan itu dapat diawasi sehingga penyimpangan dan pemborosan dapat diatasi.

S. Prajudi dalam bukunya "Dasar Dasar Ilmu Administrasi" menyebutkan bahwa :

"Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari pada yang akan dijalankan dalam rangka mencapai suatu prata (objective) yang tertentu, dimana, bilamana oleh siapa dan bagaimana." 5)

Sedangkan H. Abdulrahman menyebutkan bahwa :

"Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan atas fakta-fakta atau perkiraan yang mendekat sebagai persiapan tindakan-tindakan kemudian." 6)

Sementara itu Sondang P. Siagian dalam bukunya "Filsafat Administrasi Negara" memberikan penertian perencanaan sebagai berikut :

"Perencanaan adalah sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yangnditentukan." 7)

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses pembangunan yang dilakukan secara sadar dan secara berencana dan tidak terlepas dari Administrasi pembangunan yang merupakan suatu sistem dalam

pembangunan. Dengan adanya Administrasi pembangunan yang baik maka perencanaan akan berjalan secara teratur pula. Dalam kaitan tersebut maka penulis akan mengutip pendapat dari Fred W. Riggs dalam bukunya "Administrasi Pembangunan" menyatakan bahwa :

"Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program atau proyek terkait guna mencapai tujuan pembangunan." (8)

Dalam batasan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manfaat yang diperoleh dari pembuatan rencana itu adalah semata-mata untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pembangunan yang dilakukan tanpa didukung oleh suatu perencanaan akan mengalami kesulitan dan mungkin menemui kegagalan.

Suatu perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang memuaskan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan yang baik adalah :

1. Perencanaan bertujuan untuk mencapai perkembangansosial ekonomi (steady social economi growth).
2. Perencanaan berusaha mencerminkan kedalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Berusaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.

4. Berusaha untuk memperluas kesempatan kerja.
5. Merupakan usaha untuk pemerataan pembangunan.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
7. Ciri lain dari perencanaan pembangunan adalah adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga secara bertahap yang didasarkan kepada kemampuan.

Selanjutnya didalam perencanaan terdapat elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini didalam berbagai literatur dinyatakan sebagai aspirasi, objective, target, goal dan end.
- b. Alat-alat yang dipakai mencapai tujuan rencana berupa policy, strategi.
- c. Alokasi diberbagai sumber (man power, keuangan, peralatan, perbekalan dan tanah).
- d. Elemen yang bersifat operasional yang berhubungan dengan implementasi rencana.

Prof. Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya "Perencanaan Pembangunan" mengemukakan unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar yang sering disebut sebagai tujuan, arah dan

- prioritas-prioritas pembangunan.
- b. Adanya kerangka rencana yang disebut sebagai kerangka makro.
 - c. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan.
 - d. Adanya kerangka kebijaksanaan yang konsisten.
 - e. Adanya program investasi, program ini dilakukan secara sektoral (pertanian, industri, pertambangan, pendidikan dan perumahan dan lain-lain).
 - f. Adanya Administrasi pembangunan yang mampu mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini perlu ditelaah sistem administrasi, mekanisme kerja dan kelembagaan.

Dengan adanya perencanaan yang baik, dan didukung oleh sistem administrasi pembangunan yang baik, maka pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang memuaskan.

2. Pengertian Pembangunan

Pada dasarnya bahwa pembangunan adalah tidak lain dari pada suatu usaha atau proses usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara, dan pemerintah menurut modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Pembangunan menurut Prof. Dr. Bintori Tjokroamidjojo adalah :

"Seluruh rangkaian yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dengan menggunakan sumber daya yang ada atau terjangkau untuk menciptakan tingkatan kesejahteraan dan menjamin suasana yang lebih stabil." 9)

Oleh karena pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan oleh suatu bangsa secara berencana untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dimana dilakukan guna memaksimalkan sumber daya alam. Dengan melihat pengertian atau perumusan pembangunan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Bahwa pembangunan merupakan suatu "proses" Proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan. Meskipun proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Dan tahapan ini dapat dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu, biaya atau hasil yang diharapkan dapat diperoleh.
2. Pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan secara sadar dan timbul secara insidental dari masyarakat, hal ini tidak dapat dikategorikan pembangunan.

3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah kepada modernitas, modernitas disini diartikan cara hidup dan kehidupan yang baru yang lebih baik dari pada sebelumnya, serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungannya.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional artinya meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan terutama aspek politik, ekonomi, kultural dan administrasi.

3. Pengertian BAPPEDA

BAPPEDA atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dimana BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan dasar dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk mengetahui lebih jelas pengertian tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), maka penulis akan memberikan pengertian tentang komponen yang terkandung dalam BAPPEDA itu sendiri.

"Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu fungsi management pelaksanaan pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan bagian pembangunan nasional." 10)

Karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka pembangunan daerah harus serasi dan selaras dengan pembangunan nasional, landasan dan tujuan pembangunan daerah harus serasi dan selaras dengan pembangunan nasional.

Untuk mempercepat laju pembangunan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sampai ke pelosok daerah sehingga perlu diberikan bantuan dan rangsangan untuk menumbuhkan serta mengembangkan inisiatif dalam pembangunan. Bantuan dan rangsangan diberikan untuk membangun daerah minus/terbelakang dan daerah terpencil. Sedang usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, maka dituangkan kedalam berbagai program bantuan pembangunan khususnya bantuan Inpres yang telah meletakkan tanggung jawab lebih banyak kepada aparatur pemerintah daerah didalam pelaksanaannya : Bantuan Inpres Desa, Bantuan Inpres TK I, bantuan Kabupaten dan bantuan lainnya.

Berdasarkan kegiatan pembangunan diatas sehingga penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "Pembangunan Daerah ialah

kegiatan pembangunan dalam arti luas yang mencakup kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN (sektoral), APBD, Bantuan Inpres/Program lain, dan dilaksanakan oleh swasta, termasuk swadaya masyarakat.

Pembangunan Daerah dapat juga diartikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada atau yang dilakukan oleh daerah dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari kegiatan dan proyek-proyek pembangunan nasional yang ada di daerah itu dan kegiatan dan proyek-proyek yang ada diluar yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Perencanaan pembangunan daerah perlu dipelajari dan dimengerti karena :

1. adanya potensi yang berbeda
2. adanya ketidak seimbangan pembangunan daerah
3. adanya keadaan kondisi yang berbeda.

Sedangkan pengertian daerah (region) dapat dibagi menjadi empat (4) pengertian yaitu :

1. Region yang ditentukan atas dasar adanya kesamaan unsur. Dimana pembagian ini dilakukan atas dasar kesamaan unsur fisik, seperti keadaan tanah, ketinggian tanah, iklim, adanya defisit dan lain-lain.
2. Region yang ditetapkan karena adanya hubungan atau kegiatan/ketergantungan antara satu titik

modal kegiatan, atau pemukiman lainnya.

3. Region yang ditentukan karena adanya masalah tertentu atau keadaan tertentu, penentuan ini cenderung bersifat analisis perencanaan untuk melihat masalah-masalah yang ada pada wilayah tertentu karena melihat masalah tersebut dalam suatu wilayah, maka didalam pemecahannya dilakukan secara khusus sesuai dengan masalah tersebut.

4. Region yang ditentukan berdasarkan administratif, selain yang disusun dan ditekankan berdasarkan cara dan kriteria di atas, maka region itu ditetapkan berdasarkan susunan administratif pemerintahan baik secara nasional maupun secara daerah. Seperti di Indonesia terdiri dari :

- pemerintah pusat
- pemerintah daerah Tingkat I
- pemerintah daerah Tingkat II

Dengan adanya pembagian region akan memudahkan pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk menyusun program dan proyek daerah. Perencanaan daerah adalah suatu kegiatan dalam pembangunan yang dilaksanakan pada suatu daerah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan perencanaan pembangunan adalah sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan

pemangunan akan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Serta penentuan pilihan cara-cara alternatif yang efisien dan maksimal guna mendapai tujuan-tujuan tersebut sesuaidengan sumber daya yang ada dan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu yang dipilih sebelumnya.

Dari pengeryian uraian diatas dapat disimpulkan tentang pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bappeda adalah banda yang berfungsi membuat perencanaan pembangunan didaerah, baik daerah Tingkat I maupun daerah Tingkat II.
2. Bappeda adalah badan staf yang membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan.

B. Dasar dan Tujuan Pembangunan Daerah

1. Dasar Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 5 tahun 1982 tentang pembentukan dan Tata Kerja Ortanisasi Bappeda TK Sidenreng Rappang. Pembangunan daerah merupakan bagian yang integral dari pemangunan Nasional. Oleh karena itu landasan dan tujuan pembangunan daerah dan pembangunan Nasional tidak boleh bertentangan dan saling tumpang tindih.

Desentralisasi pembangunan dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah ditegaskan dalam GBHN sejak tahun 1973 sampai dengan GBHN 1988 memberi petunjuk singkat tentang hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menuju jtonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab untuk kelancaran pembangunan daerah.

Mekanisme pelaksanaan pembangunan di daerah pada dasarnya tidak dapat terlepas dari tata penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 maupun berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Undang-Undang No.29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (lembaran negara R.I. No. 74 tahun 1959, tambahan lembaran Negara R.I. No.1822), dan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah (lembaran negara R.I. No.38 tahun 1974, tambahan lembaran negara R.I. No.3037).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.185 tahun 1980, maka dipandang perlu menentukan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang No.5 tahun 1982 tentang

pembentukan organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA TK II Sidenreng Rappang dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan Daerah.



Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan tertanggal 25 Oktober 1982 No. 805/X/1982 diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sidenreng Rappang No. 2 tanggal 25 Februari 1983 seri D No. 2, maka BAPPEDA Sidenreng Rappang telah sebagai Badan perencanaan pembangunan daerah tingkat II Sidenreng Rappang.

2. Tujuan pembangunan Daerah

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan Daerah adalah bagian dari pembangunan Nasional yang pada dasarnya tujuan pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembangunan Nasional. Tetapi pembangunan Nasional dan pembangunan daerah harus serasi dan selaras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam GBHN, kebijaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional di

daerah.

Sejalan dengan itu setiap tahun diusahakan peningkatan kemampuan pembangunan setiap tahun yang pelaksanaannya berlangsung didaerah-daerah, disamping itu diusahakan pula peningkatan pembangunan daerah yang mencakup berbagai sektor di daerah.

Untuk mencapai pembangunan nasional yang merata diseluruh pelosok tanah air dengan berpegang pada 8 jalur pemerataan pembangunan, maka daerah harus ditingkatkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembangunan daerah seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Dahlan Maulana, MS. dalam diktatnya "Dasar-Dasar Perencanaann Pembangunan Regional" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah,
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah,
3. Perluasan kesempatan kerja di daerah,
4. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Repelita masing-masing daerah yang berisi tujuan, asas, landasan sasaran, prioritas serta kebijaksanaan pembangunan dengan berpedoman kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk

setiap tahun disusun Program tahunan sebagai pelaksanaan dari Repelita tersebut.

Agar kegiatan pembangunan Nasional dan daerah terpadu maka penyusunan rencana harus sesuai dengan Kepres No.27 tahun 1980.

3. Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan Daerah

Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dalam menentukan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat pada daerah itu.

Bappeda TK II Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali dalam pembangunan. Maka diperlukan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan semua instansi vertikal dan dinas daerah yang ada di Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam Wilayah Tingkat II, dalam menjalankan tugasnya hendaklah berpedoman pada Kepres No.27 tahun 1980. Bappeda sebagai Badan staf yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Sistim perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang telah ditetapkan secara nasional. Sistem perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dirandang dan dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Undang-Undang dasardan garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)."
11)

BOSOWA



B A B III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sidrap

Daerah Penelitian adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang yang merupakan salah satu diantara 23 daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Yang terletak pada jarak 180 Km disebelah Utara Kotamadya Ujung Pandang. Sasaran utama penelitian ini adalah Kantor Bappeda TK II Sidenreng Rappang. Wilayah Administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dimana luasnya sebesar 2.445.84 Km² yang terbagi 7 Kecamatan dan 32 Desa/Kelurahan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 402.429 jiwa dominan beragama Islam.

Wilayah Administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan 7 Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Panca Rijang
2. Kecamatan Panca Lautang
3. Kecamatan Tellu Limpoe
4. Kecamatan Baranti
5. Kecamatan Dua Pitue
6. Kecamatan Maritengngae
7. Kecamatan Wattang Pulu.

Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang

terletak antara $3^{\circ}41' - 4^{\circ}09'$ Lintang Utara dan Lintang Selatan, dan antara $119^{\circ} - 120^{\circ}10'$ Bujur Timur dan Bujur Barat.

Kabupaten Daerah tingkat II Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Soppeng,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kotamadya Pare-Pare,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo.

B. Struktur Organisasi Bappeda Tingkat II Sidrap

Sejak terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Sidrap sebagai daerah otonomi sesuai dengan Undang-Undang Darurat No.29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Urusan yang telah diterima sebanyak 7 urusan dari 18 urusan yang ada. Urusan tersebut adalah pertanian tanaman pangan, peternakan, prikanan, pekerjaan umum, pendidikan dan Kebudayaan, kesehatan dan pendapatan daerah.

Untuk pelaksanaan urusan tersebut telah dibentuk 7 dinas daerah. Struktur organisasi Bappeda Tingkat II

Sidenreng Rappang sebagai tindak lanjut dari Kepres No.27 tahun 1980, telah dibentuk organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Jabatan struktural yang disediakan sebanyak 25 jabatan terdiri dari eselon IIIa = 1 orang, eselon IVa 5 orang, dan eselon Va 19 orang.

Dari jumlah jabatan tersebut diatas terisi 19 buah dan sisanya 6 jabatan. Kepala seksi (eselon Va) yang masih kosong karena kekurangan personil.

Menurut The Liang Gie mengatakan bahwa struktur organisasi adalah "Suatu kerangka yang menunjukkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerja sama."

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pendataan dan Laporan
- d. Bidang Ekonomi
- e. Bidang Sosial Budaya
- f. Bidang Fisik dan prasarana.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh satuan

organisasi dalam lingkungan Bappeda.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi.

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan umum.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan penyusunan rencana kegiatan
- b. Urusan keuangan
- c. Urusan Umum.

Urusan penyusunan rencana kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawain, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bidang pendataan dan laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah, serta melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang pendataan dan laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan

- program pembangunan di daerah.
- b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.
 - c. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

Bidang pendataan dan laporan terdiri dari :

- a. Seksi pengumpulan data,
- b. Seksi Analisa data dan penilaian,
- c. Seksi pelaporan
- d. Seksi Statistik dan dokumentasi.

Seksi pengumpulan data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pada pembangunan daerah. Seksi Analisa dan penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian. Seksi pelaporan mempunyai fungsi menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah. Sedangkan seksi statistik dan dokumentasi menyusun statistik dan melakukan dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Bidang ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan Energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan dunia usaha. Bidang ekonomi mempunyai fungsi.

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, Industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada di wilayah Daerah.
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi, serta pengembangan usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah daerah TK I Sulawesi Selatan dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Bidang Ekonomi mempunyai 4 seksi yaitu :

- a. Seksi pertanian,
- b. Seksi Industri, pertambangan dan Energi
- c. Seksi Perdagangan dan Koperasi,
- d. Seksi pengembangan dunia usaha.

Bidang sosial budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, mental sipiritual, pemerintahan, kesejahteraan Rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan mental Spiritual dan Pemerintahan,
- b. Seksi kesejahteraan Rakyat,
- c. Seksi Penerangan dan Komunikasi
- d. Seksi Kependudukan.

Seksi-seksi tersebut diatas bertugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana masing-masing.

Bidang Fisik dan prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber Alam dan Lingkungan hidup.

Bidang fisik dan prasarana terdiri dari :

- a. Seksi pengairan,
- b. Seksi perhubungan dan pariwisata,
- c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah,
- d. Seksi sumber Alam dan Lingkungan hidup.

Struktur organisasi dan Tata Kerja Bappeda yang tercantum dalam lampiran peraturan Daerah No.5 tahun 1982 sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

F.X. Soejadi dalam bukunya "Organization and Methods" menegaskan bahwa pemakaian tata kerja yang tepat pada pokoknya bertujuan untuk :

1. Menghindari terjadinya pemborosan-pemborosan didalam pendayagunaan faktor-faktor tenaga kerja, biaya, material, waktu dan sebagainya.

2. menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran dalam proses pencapaian tujuan,
3. menjamin adanya pembagian tugas, waktu dan koordinasi dalam melaksanakan tugas yang setepat-tepatnya.

Tata Kerja adalah merupakan suatu pola cara-cara pelaksanaan kerja yang se efisien mungkin atas sesuatu tugas yang diterima dengan memperhatikan segi-segi tujuan, tenaga kerja, biaya, peralatan, fasilitas, waktu dan ruang yang tersedia. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan pemanfaatan yang setepat-tepatnya atas sumber-sumber manajemen.

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, para kepala bidang, para Kepala Seksi dan Para kepala Urusan Pada Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan.

Hubungan kerja sama Bappeda dengan Bappenas bersifat konsultatif fungsional melalui Bappeda Tingkat I. Sedangkan hubungan kerja sama Bappeda Tingkat II dengan Bappeda Tingkat I bersifat konsultatif fungsional. Hubungan Kerja sama Bappeda Tingkat II dengan Instansi vertikal dan Dinas-dinas daerah

bersifat koordinatif.

Dalam rangka penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bappeda menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan rencana pelafon Anggaran masing-masing program.

Penyusunan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun yang bersangkutan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah atau Daerah Tingkat II Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan pengisian daftar proyek dan program setiap tahunnya diberikan kepada setiap instansi atau dinas-dinas daerah yang bersangkutan.

C. Kepegawaian Bappeda Tingkat II Sidrap

Jumlah personil yang ada di Kantor Bappeda Tingkat II Sidrap sampai sekarang (1990) sebanyak 33 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan sebanyak 8 orang, pegawai negeri sipil daerah sebanyak 10 orang.

T A B E L I
KEADAAN PEGAWAI BAPPEDA SIDRAP SESUAI
JENJANG PENDIDIKANNYA

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | SEBANYAK | % |
|-------------|---------------------------|----------|-------|
| 1. | Sarjana (S ₁) | 13 orang | 41,9 |
| 2. | Sarjana Muda | 5 orang | 16,2 |
| 3. | S L T A | 9 orang | 15,5 |
| 4. | S L T P | 3 Orang | 6,45 |
| J u m l a h | | 30 orang | 100 % |

Sumber : BAPPEDA TK II Sidenreng Rappang, 1990

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai di Kantor Bappeda Tingkat II Sidrap 41,9 % Sarjana (S₁) dan Sarjana Muda 5 orang atau 16,2 % dan tamatan SLTA 9 orang atau 15,5 % dan tamatan S L T P 3 Orang atau 6,45 %. Sedangkan keadaan pegawai menurut ilmi-ilmu

yang ditekuni/fakultas adalah :

1. Sarjana Sospol/pemerintahan : 4 orang
2. Sarjana Ekonomi : 6 orang
3. Sarjana Hukum : 2 orang
4. Sarjana Tehnik : 1 orang
5. Diploma Ekonomi : 3 orang
6. Sarjana muda ekonomi : 3 orang

Sarjana muda ekonomi lebih tinggi dibanding dengan Sarjana Muda pemerintahan (19,3 %). Diantara 16 kepala seksi terdapat 5 orang yang berpendidikan SLTA. Sedang pengalaman kerja dibidang tugas perencanaan rata-rata baru mencapai 2 - 7 tahun. Adapun pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan kursus fungsional bidang perencanaan sebanyak 10 orang, atau 32,2 % dari jumlah pegawai yang ada.

Berdasarkan data kepegawaian di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai Bappeda Tingkat II Sidrap adalah :

- Jumlah pegawai negeri sipil 67,7 %
- Jumlah tenaga Honor Daerah (HONDA) 32,3 %.

Sedangkan yang belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan telah mengabdikan selama 2 - 10 tahun.

T A B E L I I

JUMLAH PERSONIL BAPPEDA TK II SIDRAP

| NO. | Jabatan | personil/orang | Keterangan |
|-----|-----------------------------|----------------|------------|
| 1. | K e t u a | 1 | |
| 2. | Sekretaris | 1 | |
| 3. | Kepala Urusan | 3 | |
| 4. | Kepala seksi | 15 | |
| 5. | Kepala Bidang | 4 | |
| 6. | Tenaga staf dan operasional | 11 | |

Sumber : BAPPEDA TK II SIDRAP, 1990

Ketua Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Seterah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah. Sedangkan Sekretaris dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang. Pengangkatan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BAPPEDA dan diberhentikan oleh Ketua BAPPEDA.

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susuna kepangkatan diatur, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Bappeda TK II dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TK II Sidenreng Rappang.

Dengan berlakunya peraturan daerah No.5 tahun 1982 maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang no.111 tahun 1981, tanggal 15 Oktober 1981, tentang pembantuan organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sejauh mungkin menyeragamkan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan Keputusan No. 185 tahun 1980 tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, dengan berdasarkan Pedoman tersebut peraturan Daerah No. 5 Kabupaten Daerah Sidenreng Rappang dibuat dan ditetapkan untuk penyelenggaraan Organisasi BAPPEDA TK II Sidenreng Rappang.

Di Tingkat Daerah, Khususnya Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang sangat berperan dalam mengkoordinir seluruh kegiatan yang menyangkut pelaksanaan rencana tahunan. Bappeda mempunyai peranan didalam menentukan dan mengkoordinir seluruh usulan-usulan proyek yang akan dilaksanakan di daerah yang bersangkutan oleh Dinas-dinas daerah/jawatan yang bersangkutan. Baik didalam penentuan plapon Anggaran setiap tahunnya

bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah lainnya.

Pentingnya Badan Perencanaan Pembangunan di daerah oleh karena adanya tiga (3) faktor yang perlu diperhatikan :

1. Adanya potensi daerah yang berbeda;
2. Adanya ketidak seimbangan pembangunan Daerah,
3. Keadaan dan Kondisi Daerah yang berbeda.

Sebagai suatu instrumen kebijaksanaan, perencanaan adalah berfungsi dan manfaat yang cukup penting artinya dalam keberhasilan pembangunan, karena :

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat pengarahan kebijaksanaan dan fokus kegiatan yang jelas, sebagai pedoman dan arah bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan, maka penentuan tujuan dan cara-cara pencapaiannya dapat dilakukan secara rasional, berdasarkan informasi yang riil tentang keadaan, masalah dan kebutuhan masyarakat dan kecenderungan dimasa yang akan datang dan masa lampau.
3. Dengan adanya perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan atau proyeksi terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang dilalui dimasa mendatang. Baik perkiraan mengenai kebutuhan, potensi dan prospek perkembangan maupun yang menyangkut hambatan,

kendala dan resiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

4. Dengan perencanaan dapat dilakukan skala prioritas, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara bertahap atau secara berencana, dimana rencana pembangunan dapat disusun menurut tahap-tahap waktu yang sesuai dengan kemampuan sumber-sumber yang tersedia.
5. Perencanaan memudahkan upaya mengatur alokasi dana dan sumber-sumberdaya yang tersedia sesuai dengan skala dan prioritas dalam tahap rencana pelaksanaannya. Dengan demikian penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas itu dapat diatur penggunaannya secara efisien dan efektif, dan mengurangi pemborosan yang tidak perlu.
6. Dengan adanya perencanaan akan ada suatu pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengadakan pengawasan evaluasi atas hasil-hasil pembangunan yang dicapai.
7. Dengan adanya perencanaan dapat diatur konsistensi antara berbagai variabel atau unsur-unsur sosial, ekonomi suatu masyarakat atau daerah.
8. Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah ataupun jangka pendek akan memudahkan penterjemahan lebih konkrit dalam pembangunan.

D. Sarana dan Fasilitas

Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, maka diperlukan adanya sarana dan fasilitas yang memadai.

Perlengkapan kerja yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan perencana pembangunan di Daerah.

Perlengkapan kerja yang ada di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang sampai sekarang (1990) seperti perkantoran dan sebuah perpustakaan, sebuah endaraan dinas (mobil) dan satu unit komputer mikro dan IBM tiga buah mesin tik.

Namun dalam mengoperasikannya (komputer) tersebut ada dua (2) orang sebagai tenaga operator merangkap sebagai kepala seksi. Kedua orang tersebut telah mengikuti pendidikan/kursus dasar

E. Biaya Operasional Bappeda

Dalam menunjang tugas-tugas Bappeda TK II Sidenreng Rappang telah disediakan biaya pencanaan dari pemerintah pusat (Biaya umum Inpres Dati II). Dalam tahun 1990/1991 sebanyak 21 juta, yang dalam tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar Rp.7,5 juta. Disamping

itu dalam APBD Tingkat II di sediakan biaya perencanaan Daerah dan biaya penelitian sebanyak Rp.25 setiap tahun sedang biaya pendidikan dan latihan pegawai termasuk pegawai Bappeda hanya Rp.17,5 juta atau 0,11 % dari APBD Tingkat II Sidenreng Rappang 1990/1991.



B A B IV

KOORDINASI DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PERANAN

BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SIDENRENG RAPPANG

A. Koordinasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan jangka waktu kapan pembangunan itu dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang ada dinegara kita, seperti yang terlihat pada gambar 4.1. paling tidak, ada yang menyiapkan rancangan untuk tahap penetapan tujuan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bupati Kepala Daerah Tk II Sidenreng rappang tentang proses penyusunan rencana pembangunan daerah sebelum adanya Kepres No.27 tahun 1980 perencanaan pembangunan dilaksanakan pada bagian pembangunan di Kantor Bupati, dan setelah adanya Kepres No.27 tahun 1980 maka perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan pada Kantor BAPPEDA TK II Sidenreng Rappang.

Untuk mencapai rencana pembangunan yang baik diperlukan adanya koordinasi dalam penyusunan perencanaan. Dengan adanya koordinasi yang baik

sehingga tercipta sinkronisasi dalam program/proyek pemangunan daerah.

Mekanisma perencanaan pembangunan daerah dilakukan dari atas kebawah dan dari bawah ke atas.

Beberapa aspek perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan yaitu :

- a. Pendekatan yang bagaimana yang dipakai dalam penyusunan perencanaan tersebut. Pendekatan ini sering pula disebut dengan "Strategi" yang bagaimana yang akan ditempuh. Di Indonesia dengan konsep Trilogi pembangunan dipakai sebagai staregi dasar, yaitu bagaimana pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dicapai dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan serta bagaimana kondisi stabilitas politik nasional diciptakan untuk meningkatkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan.
- b. Kemampuan perencanaan untuk menggabungkan atau mengaitkan aspek mikro dan makro.
- c. Kemampuan perencanaan dalam mengusahakan dana yang tersedia untuk pembangunan, apakah dana itu berasal dari tabungan masyarakat atau berdasarkan pinjaman oleh setiap sektor atau Departemen atau Lembaga Pemerintah.

Kalau dilihat darisisi perencanaan sebagai suatu proses, maka beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu bagaimana proses perencanaan (mekanisme

perencanaan) dapat dilaksanakan. Selanjutnya perlu dicari bagaimana melaksanakannya, bagaimana tehnik dan prosedur pelaksanaannya.

Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga yang berbobot dalam perencanaan. Mekanisme perencanaan pada dasarnya adalah gabungan antara top-down approach dan bottom-up approach.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diperhatikan beberapa hal dalam merancang perencanaan yang lebih baik :

- a. Mencakup permasalahan yang mendesak yang perlu dipecahkan,
- b. mencakup landasan ketentuan hukum yang berlaku, dan pendekatan yang dipakai. .

Upaya untuk memecahkan masalah yang mendesak perlu mendapat perhatian. Karena itu identifikasi masalah harus jelas. Upaya untuk membuat perencanaan yang dilandasi oleh ketentuan hukum yang berlaku baik berdasarkan UUD 45 dan GBHN maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Untuk membuat perencanaan yang secara teknis dapat dilaksanakan (technically feasible); secara finansial dapat dilakukan, dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Untuk itu pendekatan yang dipakai perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Oleh karenanya pendekatan "atas bawah" atau top-down

approach dan dari "bawah keatas" atau bottom-up approach perlu diaplikasikan secara saling menunjang. Pernyataan ini dapat dilihat pada Skema di bawah ini :



Gambar II. Skema Mekanisme perencanaan Top-down dan Bottom-up

Perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai "suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh sudah dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa mendatang." 12)

Sistem dan Pola Dasar Pembangunan Daerah yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang,
2. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah,
3. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah,

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang biasanya memakan waktu 20 sampai dengan 25 tahun. Tiap negara mempunyai jangka waktu perencanaan yang berbeda tentang

berapa tahun ukuran jangka panjang. Untuk Indonesia perencanaan pembangunan jangka panjang dipakai 25 tahun yang terdiri dari lima tahapan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Perencanaan pembangunan jangka panjang untuk daerah biasanya berbentuk Pola Dasar Pembangunan Daerah (PDPD).

Perencanaan pembangunan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahunan. Bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah ini dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun (REPELITA).

Perencanaan pembangunan jangka pendek adalah perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu setahun atau kurang dari setahun. Biasanya program kegiatan yang dilakukan bersifat "proyek-proyek" pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan proses perencanaan adalah serangkaian kegiatan yang disusun secara berurutan dalam rangka penyusunan suatu rencana, urutan-urutan kegiatan mana biasa juga disebut tahap atau phase, dan keseluruhan tahap atau kegiatan perencanaan ini disebut proses perencanaan.

Padaluraian ini penulis akan menguraikan proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun urutan kegiatan adalah :

1. Analisa kondisi dan Identifikasi permasalahan

Kegiatannpertama dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan tentang permasalahan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki.

2. Penentuan arah dan tujuan

Yang dimaksud arah dalam proses perencanaan pembangunan daerah ialah bidang atau sekyor kehidupan yang menjadi pusat perhatian untuk pengembangan pembangunan, misalnya sektor ekonomi, pertanian dan lain-lain.

Sedangkan tujuan adalah bidang atau sektor yang telah dipilih dan ditentukan dari berbagai sektor lain.

3. Kerangka rencana yang bersifat makro sektoral dan kerangka makro yang bersifat regional.
4. Peramalan, ada dua cara yang dipakai dalam peramalan ialah ekstrapolatif dan normatif. Ekstrapolatif adalah penentuan rencana diambil dengan melihat keadaan yang pernah terjadi dan ditelusuri kecenderungannya. Sedangkan cara normatif adalah perencanaan yang membayangkan suatu keadaan yang baik pada masa yang akan datang. Untuk melihat dinamika perkembangan suatu daerah adalah :
- a. Penduduk dan kegiatan-kegiatannya,
 - b. Tehnologi,
 - c. Nilai-nilai masyarakat.

5. Formulasi dan Seleksi Alternatif

Formulasi rencana dimaksudkan sebagai tahap perencanaan yang mencoba mengemukakan berbagai macam alternatif yang dapat dipilih atas sesuatu sistem. Pembuatan atau penentuan alternatif harus berdasarkan model-model dalam phase peramalan.

6. Rencana

Rencana merupakan seleksi dari berbagai pilihan alternatif-alternatif yang diperoleh dari proses peramalan melalui proses analisa dengan berbagai pendekatan.

7. Implementasi rencana

Implementasi rencana adalah pelaksanaan dari pada proyek atau program yang telah ditetapkan.

8. Monitoring

Untuk mengetahui pelaksanaan proyek apakah berjalan sesuai dengan rencana semula atau tidak sehingga diadakan monitoring.

9. Evaluasi dilakukan setelah adanya pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan.

10. Feed-Back adalah aliran balik dari hasil pembangunan.

Mekanisme dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah (RPPD) yaitu :

- a. Penyusunan perencanaan jangka panjang yang dikenal dengan "Pola Dasar Pembangunan"

- b. Penyusunan perencanaan jangka menengah daerah yang dikenal dengan "Pola Repelita"
- c. Penyusunan perencanaan jangka pendek daerah yang dikenal dengan "Pola APBN" atau "Pola Proyek."

Proses penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang ditempuh beberapa tahapan, yaitu :

Tahap I : Persiapan

Pada tahapan ini perencanaan dilakukan dengan menampung semua aspirasi dan kehendak masyarakat di daerah tersebut. Caranya pemerintah daerah berusaha menampung semua aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil rakyat (DPRD) yang tugasnya untuk mencari informasi tentang aspirasi atau kehendak masyarakat.

Tahap II : Menyusun Rancangan I PDPD

Pada tahapan ini perencanaan dilakukan setelah menampung semua aspirasi dan informasi kuantitatif atau kualitatif, maka tahap selanjutnya rancangan yang telah disiapkan agar rancangan perencanaan tersebut akan dilaksanakan.

Tahap III : Diskusi Rancangan I PDPD

Pada tahap ini melibatkan berbagai unsur, misalnya para tokoh masyarakat, organisasi sosial, perguruan tinggi, para instansi dan dinas daerah lainnya yang terkait. Maksudnya ialah untuk "test" apakah aspirasi dan kehendak masyarakat yang dikumpulkam pada tahap I, dan dirumuskam dengan baik

dan akan dapat dilaksanakan secara operasional. Dalam banyak kenyataan, acara diskusi ini dilakukan beberapa kali dengan melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat pada daerah yang bersangkutan.

Tahap IV : Menyusun Rancangan II PDPD

Dari diskusi yang dilakukan pada tahap III tersebut, maka mungkin diperlukan penyempurnaan-peyempurnaan dari rancangan I. Bila ada yang perlu disempurnakan, maka perlu disusun rancangan tahap II PPPD. pada rancangan ini diharapkan sudah relatif lebih baik.

Tahap V : Diskusi Rancangan II PDPD

Pada tahap ini dilakukan sama seperti tahap III. Pada tahap ini rancangan PDPD sudah "matang" dan dapat dirumuskan.

Tahap VI : Penyusunan Rancangan Akhir

Berdasarkan pekerjaan pada tahap akhir PDPD yang nantinya sebagai bahan utama yang disampaikan ke sidang-sidang DPRD untuk mendapatkan pengesahan.

Tahap VII : Penyampaian Rancangan akhir PDPD ke DPRD

Pada tahapan ini, Bupati Kepala Daerah Tingkat II menyerahkan rancangan akhir ke DPRD untuk dibahas dan disahkan. Setelah rancangan akhri telah disahkan selanjutnya DPRD mengusulkan kepusat untuk selanjutnya Menteri Dalam Negeri yang menetapkannya menjadi Peraturan Daerah.

Demikian proses penyusunan dan penetapan PDPD yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Perda. Konsekuensinya ialah semua aparat Pemda (termasuk Instansi dan dinas daerah yang) terikat oleh pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan perencanaan jangka menengah dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah. Tahapan dalam penyusunan dan penetapan PPD jangka menengah adalah :

Tahap I : Tahapan Evaluasi

Pada tahapan ini diperlukan kegiatan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Repelita Daerah sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat program-program mana yang sudah atau belum dilaksanakan. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh Bappeda, instansi di wilayah Tingkat II, para ahli di perguruan tinggi atau pemuka masyarakat.

Tahap II : Membuat petunjuk penyusunan Repelitada

Pembuatan penyusunan Repelitada adalah penting untuk disebarkan ke Instansi yang ada di wilayah dati II yang dipakai sebagai pedoman dalam membuat Repelitada di Instansinya masing-masing. Harapannya adalah agar setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan seirama dengan kepentingan daerah.

Tahap III : Penyelesaian Evaluasi Pelaksanaan Repelita Daerah sebelumnya.

Hasil evaluasi dari pelaksanaan Replita sebelumnya dan penyusunan Repelita dikumpulkan dari berbagai instansi atau dinas, diolah kembali sedemikian rupa agar nantinya bahan-bahan tersebut dapat ditetapkan sebagai repelita Daerah.

Tahap IV : Penetapan tujuan.

Pada tahap ini tujuan ditetapkan dengan memilih beberapa alternatif dari sasaran pembangunan. Dalam menentukan tujuan perlu adanya proyeksi sasaran pembangunan, mana yang perlu mendapat prioritas untuk didahulukan dan mana yang ditunda pelaksanaannya. Hal ini penting mengingat adanya keterbatasan anggaran pembangunan yang tersedia.

Tahap V : Penulisan Rancangan I

Penulisan rancangan Repelita sesuai dengan pedoman pemerintah pusat c.q. Departemen Dalam Negeri. Setelah penulisan selesai maka didiskusikan kembali dengan instansi atau dinas, pemuka masyarakat dan unsur perguruan tinggi atau dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Tahap VI : Menulis Rancangan II

Setelah tahap V selesai maka hasil rancangan I diperlukan untuk melaksanakan penulisan rancangan Repelita II Kemudian didiskusikan kembali guna

penyempurnaannya.

Tahap VII : Tahap Terakhir

Tahapan ini adalah penetapan Rancangan Repelitada tahap II. Rancangan ini didiskusikan kembali untuk lebih sempurna. Kemudian, pada tahap ini penetapan Rancangan Repelita Daerah yang dituangkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah (PPPD) jangka pendek umumnya merupakan kegiatan pembangunan dalam bentuk proyek yang lamanya kurang lebih satu tahun atau kurang dari satu tahun. Kegiatan Pembangunan jangka pendek akan dibiayai oleh APBD. Karena itu PPPD sering disebut perencanaan proyek. Sebelum PPPD dilaksanakan maka dilakukan pertimbangan antara lain :

a. Memperhatikan ketetapan perencanaan yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun daerah, seperti perencanaan yang ditetapkan oleh Desa, Kecamatan, Kabupaten.

b. Memperhatikan kepentingan rakyat banyak

Ada beberapa tahap dalam PPPD jangka pendek yang sering dilakukan yaitu :

Tahap I : Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa

Tujuan utama dari tahap ini adalah mendorong adanya musyawarah ditingkat yang paling bawah, yaitu ditingkat desa, musyawarah ini dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melalui musyawarah

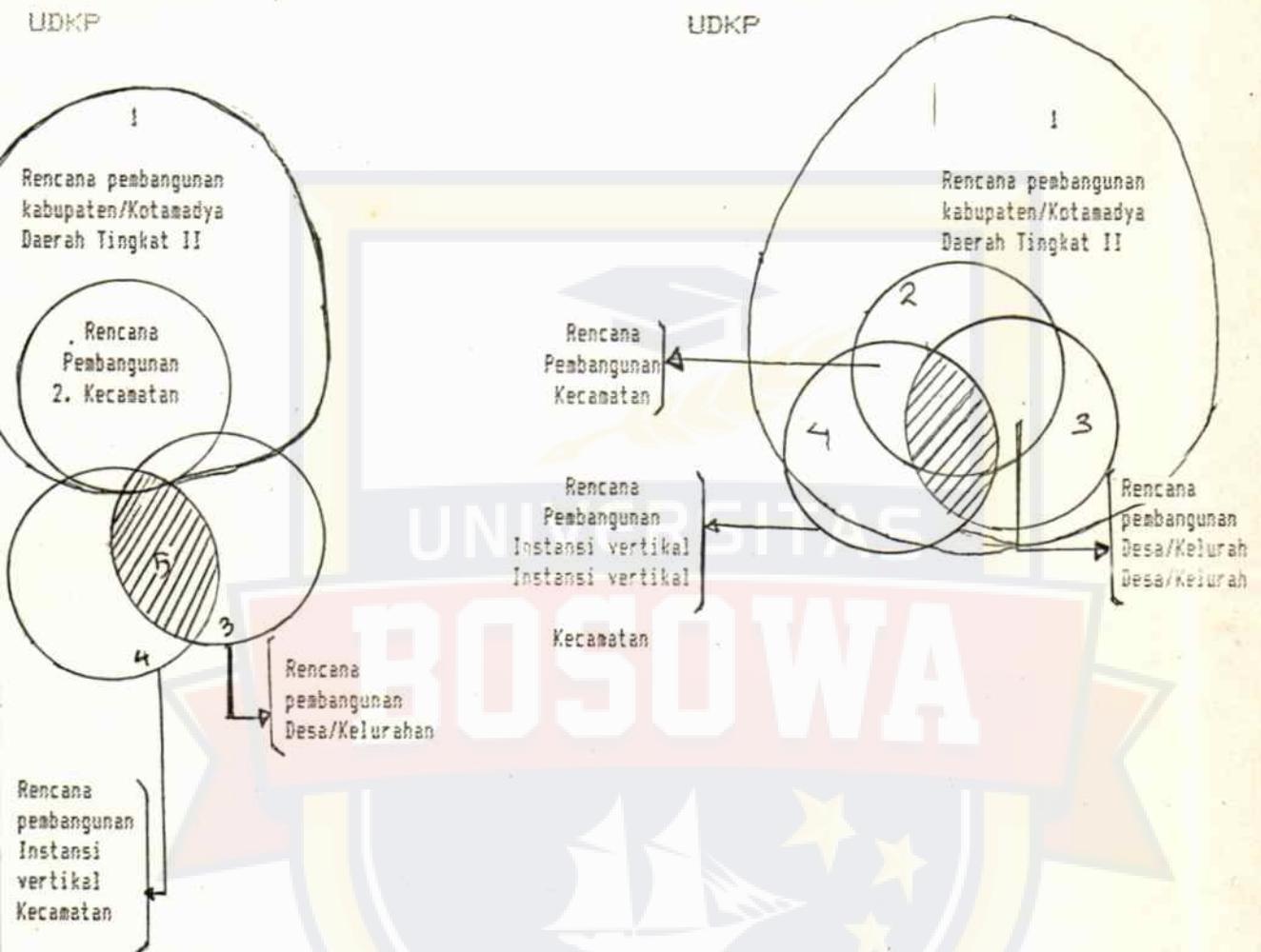
yang dikoordinir oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Biasanya setahun sekali (setiap bulan Maret atau April) musyawarah pembangunan Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh ketua umumnya yang biasanya merangkap sebagai kepala Desa. Pada rapat desa biasanya dihadiri oleh camat selaku pembimbing atau pembina. Hasil musyawarah pembangunan desa baik yang dibiayai secara swadaya atau APBD, akan dimusyawarahkan di tingkat Kecamatan. Musyawarah di tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh Camat atas bimbingan atau binaan dari Bupati. Forum musyawarah di tingkat kecamatan tersebut sering disebut nama "Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan".

Tahap II : Musyawarah pembangunan (Musbang) Tingkat Kecamatan

Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dilakukan atau dilaksanakan setelah musyawarah tingkat desa selesai. Jadi kalau musbang desa dilakukan pada bulan Maret, maka Musbang Tingkat Kecamatan, merupakan "Temu Karya" para pengurus LKMD. Temu Karya ini dipimpin oleh camat dan dibimbing Bupati, atau Ketua Bappeda Kabupaten atau Kantor Pembangunan desa di tingkat kabupaten. Seperti pada Musbang atau musyawarah tingkat desa, maka Musbang Kecamatan menentukan skala prioritas pembangunan Kecamatan yaitu program mana yang dibiayai oleh APBD dan mana yang dikerjakan oleh swadana.

Musbang Kecamatan bagi daerah kecamatan UDKP mempunyai "Kekhususan". UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) adalah suatu manajemen yang terpadu dalam wilayah kecamatan. UDKP merupakan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa dan terpadu pada tingkat wilayah Kecamatan. Jelasnya lihat gambar 3.



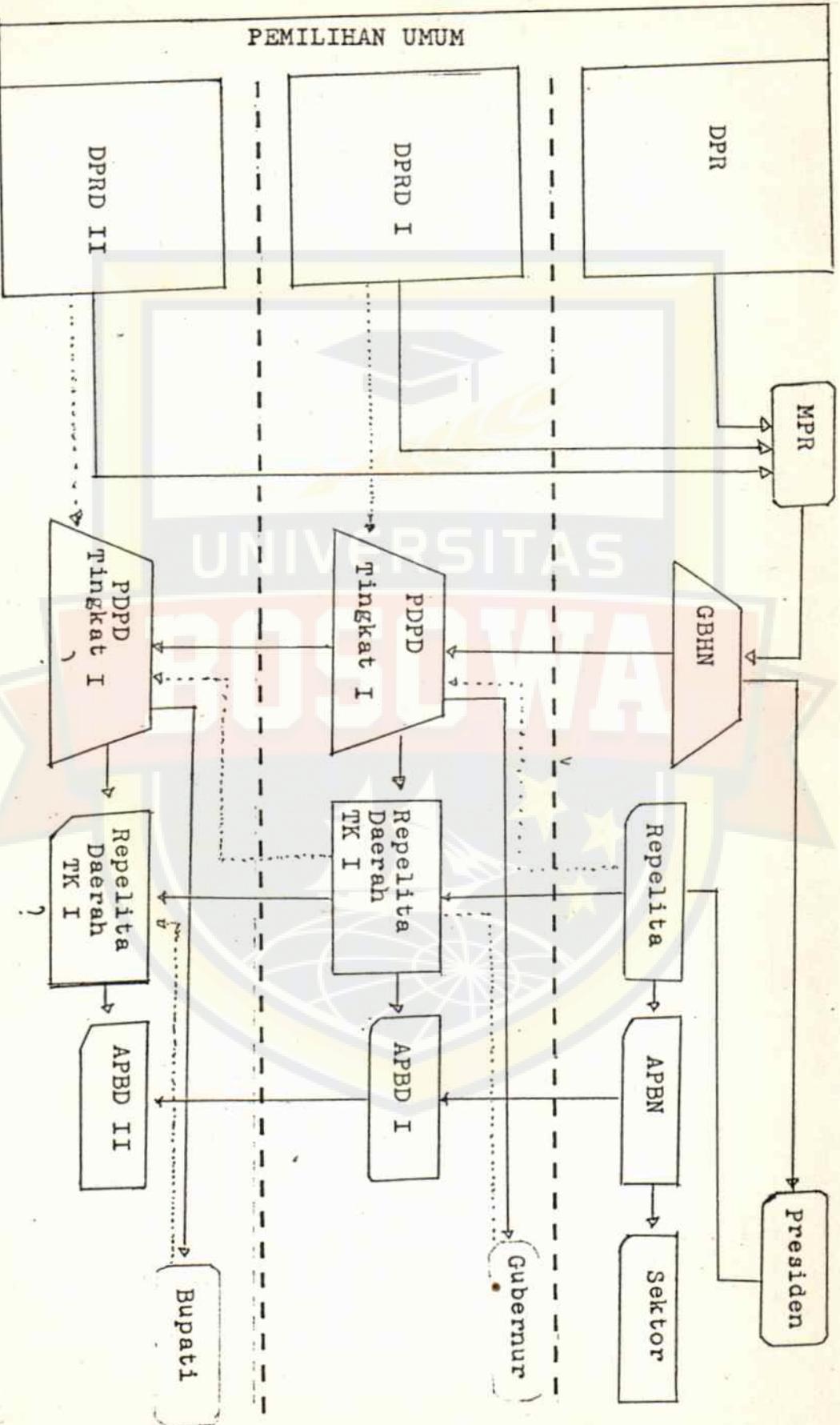


Penjelasan :

1. Rencana pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah TK II (Repelita dan Rencana Pembangunan tahunan).
2. Rencana Pembangunan Kecamatan (RPJMK dan RPTK).
3. Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan dan rencana pembangunan tahunan desa/kelurahan).
4. Rencana pembangunan instansi vertikal kecamatan (Rencana Jangka Menengah dan tahunan).
5. Keterpaduan rencana pembangunan pada Tingkat Kecamatan (terpadu dalam hal wilayah, fungsional, kebersamaan waktu dan sasaran).

Sumber : Dep. Dalam Negeri (1984), "Panduan Operasional Sistem UDKP bagi Camat," Jakarta.

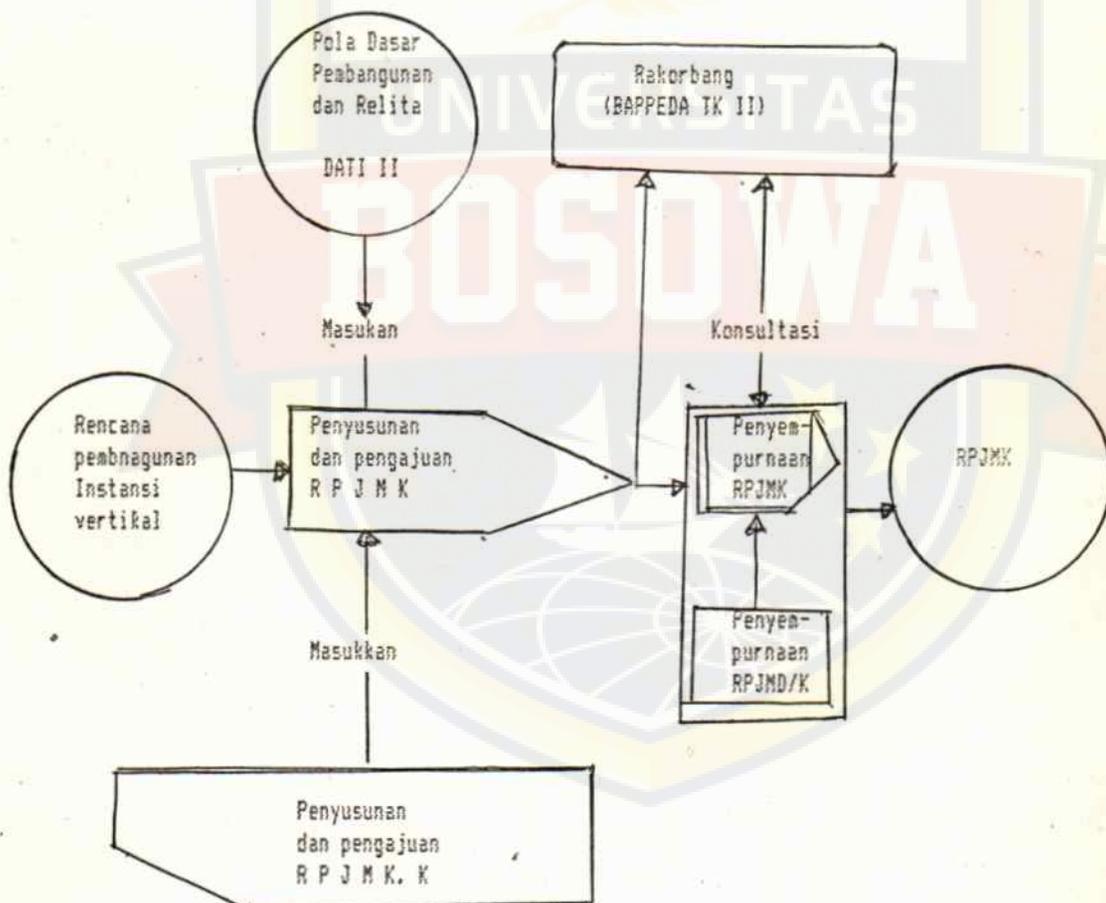
Gambar 3. Keterpaduan Rencana Pembangunan Kecamatan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kotamadya, Instansi vertikal Kecamatan dan Desa/Kelurahan.



Sumber : Dr. Soekartawi, "Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan hal. 18

Gambar 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah di Indonesia

Pada gambar 4.4 terlihat bahwa proses penyusunan rencana pembangunan kecamatan, baik yang jangka waktu menengah maupun pendek, senantiasa terikat pada rencana pembangunan di tingkat Kabupaten, Kaitan antara rencana pembangunan jangka menengah kecamatan (RPJMK) dan pola dasar pembangunan daerah (PDPD) dapat dilihat pada gambar 4.5.



Gambar 5. Proses penyusunan RPJMD (desa) dan RPJMK (Kecamatan)

Sumber : Dep. Dalam Negeri (Ibid, 1984).

Pada gambar tersebut diatas terlihat adanya Proses penyusunan RPJMK merupakan proses yang agak

panjang dan merupakan proses yang sekali jadi.

Tahap III : Musyawaran pembangunan (musbang) tingkat Kabupaten atau kotamadya.

Musbang Tingkat Kabupaten atau Kotamadya merupakan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) Daerah Tingkat II. Tugas ini biasanya dipimpin Ketua Bappeda Daerah Tingkat II yang harus mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari Bupati atau walikotamadya selaku penguasa tunggal di daerah Tingkat II. Rakorbang ini membahas semua usulan dari masing-masing kecamatan, dan karenanya merupakan "Temu Karya" pembangunan Tingkat Kecamatan. Pesertanya adalah para Kepala Wilayah Kecamatan dan para Kepala Instansi atau dinas Daerah Tingkat II.

Seperti pada Temu Karya Kecamatan, maka Rakorbang di Daerah Tingkat II harus juga berpedoman dengan PDPD Tingkat II dan PDPD Tingkat I yang telah ditetapkan. Dalam hal penentuan dan pemilihan proyek harus disesuaikan dengan potensi daerah. Dalam penentuan alternatif perlu skala prioritas yang dianggap paling mendesak.

Kalau Rakorban Tingkat II dilakukan sekitar bulan Mei setelah Temu Karya Tingkat Desa dilaksanakan bulan Maret dan temu karyatingkat kecamatan bulan April. Penjadwalan dimaksudkan agar sesuai dengan tahunan anggaran agar pendanaan setiap program dapat diatur

berdasarkan waktu dana tersedia.

Tahap IV : Musyawarah Pembangunan (Musbang) Tingkat I.

Musbang ini diselenggarakan dalam bentuk Rakorbang yang dihadiri oleh para Bupati, Ketua Bappeda TK II, Intansi atau lembaga Vertikal dan satuan Organisasi lainnya. Rakorbang ini dipimpin Ketua Bappeda Tingkat I yang tentu saja mendapatkan bimbingan dan arahan Gubernur. Pada Rakorbang ini membahas usulan proyek yang diajukan pemerintah atau lembaga daerah Tingkat II. Dengan demikian pada Rakorbang ini akan diperoleh suatu sistem perencanaan pembangunan yang secara menyeluruh dan terpadu di Daerah Tingkat I.

"Menyeluruh" mengandung pengertian bahwa segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada, misalnya sumber daya alam, manusia, ilmu dan teknologi telah dipertimbangkan pada proses penyusunan perencanaan tersebut. Sedangkan "terpadu" mengandung pengertian bahwa ada suatu kaitan antara wilayah dalam arti desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatan, kabupaten dengan Kabupaten lainnya. "Kaitan Wilayah" ini dapat dipandang secara horisontal maupun vertikal.

Di samping itu perlu diperhatikan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memperhitungkan adanya konsep pembangunan regional dan nasional. Kepentingan pembangunan regional biasanya

disenut "Konsultasi Pembangunan Regional (KPR)." Misalnya untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang pusatnya di Ujung Pandang. Perlu pula memperhatikan subregion lainnya (Sulawesi utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan lain-lain), yang merupakan subregion.

B. Keterlibatan Instansi Vertikal/Dinas Daerah Dalam Perencanaan

Mekanisme pembangunan di daerah yang dikenal dengan pembangunan yang bersifat dekonsentrasi dan pembangunan pembantuan merupakan suatu "pendekatan" atau seni dan tehnik manajemen pembangunan. Oleh karena itu orang Bappeda tidak dapat hanya berpikir dan merencanakan aspek kepentingan regional dan mengenyampingkan kepentingan sektor, tetapi harus bersama-sama berkembang serasi dan selaras dalam orientasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk menciptakan stabilitas di daerah.

Namun demikian campur tangan yang terlalu banyak yang datangnya dari sektor (pemerintah pusat) melalui kantor wilayah dan kantor Departemen di daerah, dapat melemahkan perencanaan prioritas pembangunan regional atau daerah. Sehingga perencanaan bottom-up kurang muncul.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda

seperti yang telah digariskan dalam Kepres No.27 tahun 1980 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1982 tentang Koordinasi Bappeda dengan instansi-instansi lainnya. Maka Bappeda TK II Sidenreng Rappang mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional di daerah serta rencana antara daerah sendiri.

Dalam usaha mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah, baik yang ditangani oleh dinas-dinas daerah maupun instansi vertikal lainnya. Vertikal perlu dibina dan dipelihara komunikasi yang baik antara aparatur di dalam maupun di luar organisasi tersebut.

Penyusunan program tahunan oleh setiap instansi haruslah mempunyai kaitan dengan program instansi lainnya, yang sehubungan dengan lokasi dan waktu serta tujuan yang akan dicapai. Koordinasi antara dinas-dinas daerah merupakan salah satu fungsi Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan koordinasi adalah sebagai berikut :

Tahap I : Identifikasi Kebijakan

Pada tahap ini Bappeda TK II Sidenreng Rappang memberikan pengarahannya kepada semua instansi tentang :

1. Pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dihadapi dalam tahap yang sedang berjalan.

- Keterlambatan/kemampuan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang tersedia,

- Langkah kebijaksanaan tahunan berdasarkan permasalahan dan ketersediaan potensi di daerah.

2. Penentuan program tahunan berdasarkan urutan prioritas yang sesuai tahap kebijaksanaan tersebut.

3. Identifikasi program yang harus ditangani oleh berbagai instansi atau dinas-dinas daerah lainnya.

Tahap II : Identifikasi fungsional

Pada tahap ini dilakukan kegiatan :

a. Sejauh mana keterbatasan dan kewenangan tiap-tiap instansi untuk dapat melaksanakan program/proyek yang direncanakan.

b. Sejauh mana keterlibatan fungsional antara instansi tersebut.

Tahap III : Identifikasi struktural

Pada tahap ini dilakukan :

a. Kebijakan dari Departemen atau lembaga yang membawahi instansi yang bersangkutan.

b. Program tahunan dari Departemen atau lembaga yang membawahi instansi tersebut.

Tahap IV : Penentuan Koordinasi Operasional

Pada tahap ini dilakukan :

a. Program tahunan apa yang dapat direncanakan oleh setiap instansi yang bersangkutan yang mempunyai kaitan ketergantungan dengan instansi lain, yang sehubungan dengan lokasi dan waktu serta tujuan yang akan dicapai.

- b. Bagaimana urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing instansi agar terdapat keserasian dan keterpaduan antara satu instansi dengan yang lainnya.

Tahap V : Penyusunan Pola Koordinasi

Berdasarkan keempat tahap yang telah dilaksanakan di atas, maka Bappeda TK II Sidenreng Rappang mengadakan rapat koordinasi yang mencakup kelima aspek koordinasi tersebut di atas. Pada Koordinasi disusun berdasarkan pendekatan menurut terminal sistem. Pada tahap ini mencakup komponen :

1. Program tahunan apa yang dapat direncanakan oleh setiap instansi yang mempunyai program atau proyek.
2. Titik awal dan titik akhir kegiatan dari masing-masing instansi.
3. Kemampuan dan keterbatasan sumber dana, peralatan, tenaga instansi yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, maka Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang mengadakan rapat-rapat yang dipimpin oleh Ketua Bappeda. Sehingga Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang terpadu dan terarah sesuai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan Pembangunan yang dimaksudkan hanya dapat diwujudkan apabila ada koordinasi yang baik diantara instansi-instansi

vertikal atau dinas-dinas daerah dalam lingkungan pemerintah daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Dalam hubungan ini Bappeda TK II Sidenreng Rappang dalam kedudukannya sebagai badan staf yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah TK II yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di antara instansi vertikal dan dinas daerah serta badan-badan lain yang ada hubungan dengan perencanaan pembangunan.

Hasil wawancara penulis dengan instansi-instansi vertikal yang terkait dengan Bappeda TK II Sidenreng Rappang mengatakan :

"Partisipasi Instansi vertikal dengan dinas daerah dengan Bappeda TK II Sidenreng Rappang dalam penyusunan perencanaan di Koordinasi oleh Bappeda sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal penyajian data data khususnya data yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih akurat."

Pendekatan pembangunan di Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang masih dominan pembangunan sektor, dibanding dengan pembangunan kewilayahan. Nampaknya egois sektor masih kuat yang ditandai oleh besarnya peranan pendanaan yang datangnya dari oleh kantor wilayah di Propinsi, sedang kantor Departemen di Kabupaten tidak diberi wewenang kebijaksanaan perencanaan, Sehingga Bappeda Tingkat II mengalami kesulitan mengkoordinasikan kebijaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Kebijaksanaan spasial (seluruh wilayah dibagi dalam sub wilayah pembangunan) yang kemudian dijabarkan dengan istilah "Peta Pengwilayahan" berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bappeda TK II masih kurang memanfaatkan informasi yang tersedia, seperti geologi, hidrologi, tata guna tanah dan tata pertanian serta kehutanan.

Konsep pengwilayahan komoditas sedemikian umum belum dirinci, sehingga tidak operasional dan akibatnya dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang menyebarkan pertikaian antara sektor dan dinas.

Bappeda masih sulit mengendalikan semua kegiatan pembangunan di daerah, karena kesulitan informasi terutama masalah tembusan Daftar Isian Proyek (DIP)/ program sektoral termasuk proyek BUMN tidak ada pada Bappeda, kecuali data relokasi perpyek sektoral dan APED I yang datangnya masih secara regional belum dirinci tiap kabupaten.

Perencanaan dapat terlaksana secara terpadu apabila perilaku setiap orang/pihak yang terlibat (pihak Bappeda, dinas daerah, instansi vertikal) benar-benar saling mengerti kedudukan dan fungsinya, dan yang paling penting adalah perasaan yang penuh kekeluargaan masing-masing, baik yang mengkoordinir maupun yang dikoordinir. Kemampuan Bappeda TK II Sidrap dalam

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektor dengan pemilihan prioritas pembangunan daerah dalam tata ruang pengwilayahan komoditas adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan oleh manager Bappeda. Bukan hanya adanya kewenangan (PP No. 6 tahun 1980 dan Kepres No. 27 tahun 1980), tetapi yang lebih penting adalah adanya kewibawaan dan kepemimpinan manager Bappeda dalam membantu atau melaksanakan Koordinasi perencanaan pembangunan dengan instansi yang terkait di daerah tersebut.

Dann Sugandha dalam bukunya "Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi" berpendapat bahwa :

"Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua pihak atau anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi untuk kerjasama antar instansi kedalamproses melaksanakan kerja dibawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan tertentu." 13)

Dalam hal ini koordinasi menurut sikap dan prilaku tertentu dari orang-orang kepala unit, maupun dari kepala instansi tertentu yang terlibat dalamhubungan kerja sama. Baik sikap yang mengarahkan atau koordinator, maupun sikap yang diarahkan atau yang dikoordinasikan.

Pelaksanaan koordinasi mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan daerah yang serasi dan selaras. Dengan diaturnya secara mantap kedudukan Bupati Kepala Daerah, maka koordinasi pembangunan mendapat tempat

tertentu yang elastis dan wajar dalam roda pemerintahan. Rencana yang konsisten yang harus dilakukan secara vertikal dan horizontal melalui konsultasi-konsultasi yang menyangkut kewenangan instansi pemerintah pusat maupun di daerah selama berlangsungnya pembangunan.

Adapun unsur-unsur pembangunan yang dilakukan di daerah selama berlangsungnya adalah :

- a. Kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan nasional yang ada di daerah itu sendiri.
- b. Kegiatan-kegiatan dan proyek pembangunan daerah di luar yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, maka perencanaan dan pengarahannya bukan saja dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya koordinasi perencanaan.

Apabila perencanaan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, maka kebijaksanaan yang demikian, berarti mengakibatkan peran inisiatif yang dibuat oleh pemerintah.

Pentingnya koordinasi/keterlibatan instansi vertikal dan dinas/dinas daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah :

1. Untuk mengetahui kaitan fungsional antara suatu instansi dengan instansi lainnya dalam berbagai kegiatan pada setiap tahap perencanaan untuk

mewujudkan keterpaduan antara program/proyek pada suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

2. Untuk mengetahui maksud kaitan antara program/proyek yang direncanakan dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku,
3. Untuk mengetahui adanya akibat koordinasi dalam bentuk penugasan pada setiap tingkat instansi yang bersangkutan.
4. Untuk mengetahui adanya kaitan koordinasi antara program dan proyek intra dan antar instansi,
5. Untuk mengetahui adanya kaitan dalam setiap langkah pelaksanaan,
6. Dengan adanya koordinasi perencanaan diharapkan terdapat pangarahan kebijaksanaan dan fokus kegiatan yang jelas, adanya pedoman yang terarah bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1974, maka keseluruhan badan atau instansi yang terlibat dalam fungsi fungsi management adalah :

a. Fungsi Perencanaan (Planning)

Disamping ada pada masing-masing instansi vertikal maupun otonomi daerah, Bappeda mengembangkan dominan dan keseluruhan fungsi perencanaan ini,

b. Fungsi aktuasi (actuating) yang sering juga disebut sebagai fungsi eksekutif, berada pada wewenang Bupati Kepala Daerah (BKDH). Masing-masing instansi vertikal maupun daerah melaksanakan fungsi aktuasi, hanya bagi diri Gubernur/Bupati/Walikota/madya selaku Kepala Wilayah juga mengkoordinasikan kepada kantor wilayah dan kantor daerah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

c. Fungsi pengontrolan atau pengendalian (controlling) terutama sekali dilaksanakan oleh inspektur wilayah propinsi/Kabupaten/Kotamadya (IRWI).

Walaupun fungsi-fungsi tersebut telah dibagi di atas tetapi tidak berarti masing-masing instansi di daerah itu tidak menjalankan fungsi pengontrolan, mereka tetap melaksanakan fungsi pengontrolan di dalam atau sering disebut dengan "Internal Control".

Jika hal ini dikaitkan dengan aktivitas untuk menjalankan pembangunan daerah, maka semua instansi operasional yang terdepan sampai dengan petugas/pejabat penyelenggaraan pemerintah di desa-desa menjalankan pembangunan.

Konsultasi intern yang dilakukan oleh Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang, dimana dalam konsultasi ini Bupati Kepala Daerah meminta kepada instansi vertikal/non departemen dan dinas-dinas daerah dalam lingkungan Dati III Sidenreng Rappang untuk mengajukan

usul rencana program/proyek pembangunan. Selanjutnya dibawah koordinasi ketua Bappeda, usul rencana program/proyek pembangunan hasil diskusi temu karya pembangunan tingkat kecamatan dan usul rencana program/proyek yang berasal dari dinas-dinas daerah atau instansi vertikal/non Departemen secara intern dibahas dan diusahakan oleh lebih dahulu bersama-sama dengan bagian pembangunan dan keuangan serta Sekwilda TK II Sidrap, serta Kepala Pembangunan Desa Kabupaten Sidrap.

Dengan petunjuk, bimbingan dan arahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, baik strategi maupun prioritas pembangunan sesuai pelita Nasional dan Daerah. Maka dibawa koordinasi Ketua Bappeda usul rencana program dan proyek pembangunan dibahas lagi dalam suatu forum konsultasi intern yang dihadapi oleh para Kepala Wilayah Kecamatan, instansi vertikal dan dinas-dinas daerah dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan dan keserasian program/proyek pembangunan daerah tingkat II Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan responden bahwa hal-hal yang sering dikonsultasikan dengan Bappeda Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang antara lain :

1. Jenis program/proyek yang akan direncanakan pada lokasi program/proyek, dan masalah teknis pelaksanaan,

- 2. Laporan evaluasi perkembangan proyek dan dana,
- 3. Skala prioritas dan monitoring pelaksanaan proyek.

Agar program/proyek pembangunan daerah itu satu sama lain yang dapat menunjang secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang lebih menyeluruh dan terpadu. Sehingga pemberian informasi dan laporan penyusunan rencana merupakan alat pembantu yang sangat penting dan penyusunan rencana pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh.

Penyusunan rencana yang baik memungkinkan pelaksanaan pembangunan secara nyata, didasarkan pada gambaran nyata dari suatu pembangunan daerah, yang hanya dapat diperoleh melalui pemberian informasi dan laporan penyusunan rencana yang lengkap dan terkoordinasi.

Keterlibatan instansi-instansi lain dalam penyusunan rencana pembangunan dapat diertikan sebagai usaha untuk mendapatkan data sebagai bahan analisa terutama dalam rangka penyusunan rencana yang efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari para kepala bidng di kantor Bappeda TK II Sidrap menyatakan :

"Kehadiran segenap instansi/lembaga tersebut untuk berperan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dimaksudkan sebagai usaha untuk

membentuk perencanaan yang terpadu dan saling mengisi sehingga tercipta penyusunan rencana pembangunan di daerah."

Dengan demikian potensi Bappeda TK II Sidrap, berarti sebagai pengembang fungsi koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, namun demikian pelaksanaan program/proyek pembangunan yang betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam Ensiklopedia Administrasi dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan koordinasi adalah :

"Suatu pengertian dimana terkandung esensi-pada tidak terjasinya -kegagalan, persekutan, kekambaran, kekosongan kerja, sebagai akibat dari pada pekerjaan menghubungkan-hubungkan, menyatupadukan dan menyeleasikan orang-orang dan pekerjaannya dalam suatu kerjasama yang diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu." 14)

Sedangkan Winardi dalam bukunya "Azas-azas Menagement" mengemukakan bahwa :

"koordinasi adalah sinkronisasi usaharusaha teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk petunjuk pelaksanaan dan arah pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan yang harmonis serta yang disatukan dalam rangka usaha mencapai obyektif tertentu." 15)

Pada hakekatnya koordinasi adalah perwujudan dari pada kerjasama, saling bantu-membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini dapat disebabkan karena setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tergantung atas bantuan dari satuan kerja yang lain Jadi adanya

saling ketergantungan inilah yang mendorong perlunya kerjasama organisasi atau antara satu instansi dengan instansi lainnya.

Adapun instansi-instansi vertikal/Non Departemen dan dinas-dinas daerah atau unit kerja yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. BKDH/Pejabat-pejabat teras Kantor Bupati Kepala Daerah (semua Kepala bagian).
2. Instansi-instansi sektoral meliputi :
 - a. Departemen Dalam negeri
 - 1) kantor Pembangunan Desa
 - 2) Direktorat Sospol
 - 3) Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).
 - b. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - c. Departemen Kehakiman.
 - d. Departemen Agama
 - e. Departemen Sosial
 - f. Departemen Pertambangan dan Energi (PUN)
 - g. Departemen Pekerjaan Umum
 - 1) Dinas PUD
 - 2) Dinas PU Seksi Pengairan
 - 3) Dinas PU Seksi Bina Marga.
 - h. Departemen Pos dan Telekomunikasi
 - i. Departemen Kesehatan
 - j. Departemen Koperasi

- k. Departemen Perdagangan
- l. Departemen Prindustrian
- m. Departemen Pertanian
 - 1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 - 2) Dinas Peternakan
 - 3) Dinas Perikanan
 - 4) Dinas Perkebunan.
- n. Departemen Perhubungan
 - 1) Pariwisata
 - 2) LLAJR
 - 3) LLASDP.

3. Instansi-instansi Non Departemen

- a. Statistik
- b. BKKBN
- c. D o l o g.

Untuk menjamin keterpaduan pembangunan proyek/proyek terutama yang ditangani oleh instansi vertikal/dinas dinas daerah, maka diadakan rapat konsultasi periodik proyek sektoral, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan bersama menteri EKUIN/Ketua Bappenas, menteri keuangan dan menteri Dalam Negeri Nomor SE. 12 IDJA/III.02/1979 tanggal 16 Pebruari 1976.

Pengertian Koordinasi menurut Drs. Manullang dalam bukunya "Dasar-Dasar Managemen" menyatakan bahwa :

"Koordinasi adalah usaha mengarahkan seluruh

kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan." 16)

Sedangkan pengertian Koordinasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1982 tentang pedoman penyusunan perencanaan dan Pengendalian pembangunan Daerah (PSD) adalah :

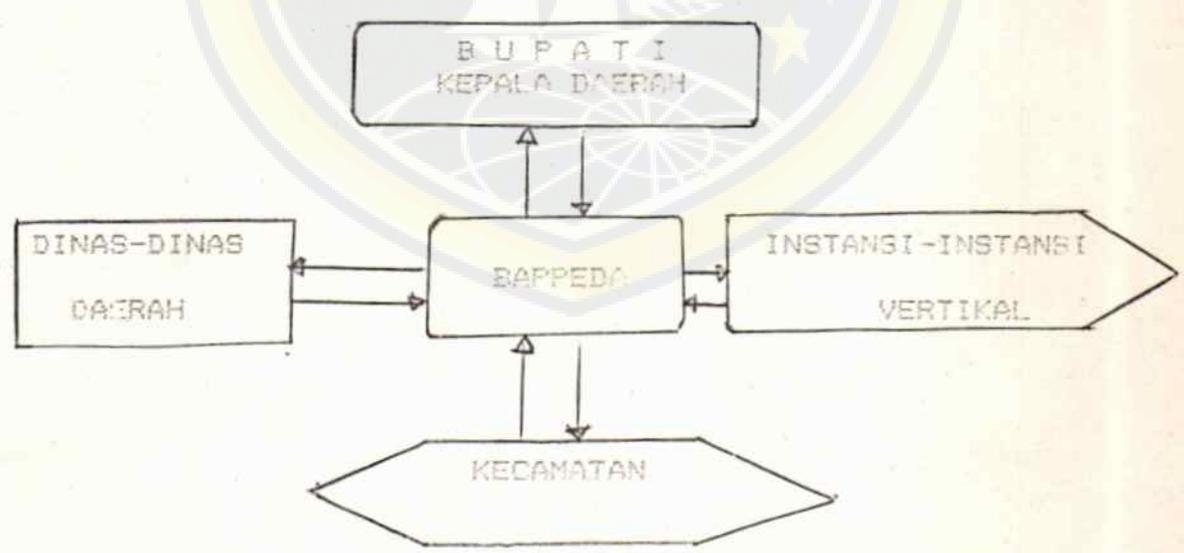
"Koordinasi sebagai salah satu fungsi management diartikan sebagai usaha untuk menyerasikan langsung dan kegiatan antara berbagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk memperjelas hubungan koordinasi antara Bappeda dengan instansi-instansi terkait, maka di bawa ini terlihat suatu skema.



GAMBAR 6

SKEMA : HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DENGAN INSTANSI-INSTANSI TERKAIT



Sumber : BAPPEDA TK (I) SIDRAP.

Dari skema tersebut diatas menjelaskan hubungan koordinasi antara Bappeda TK II Sidrap dengan instansi-instansi vertikal, dinas-dinas daerah dan kecamatan.

Bappeda menyingkronisasikan data/informasi dari usul-usul setiap instansi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari para Kepala Bidang Bappeda TK II Sidrap dengan instansi yang ada menyatakan bahwa :

"Kehadiran segenap instansi/lembaga untuk berperan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam rangka membentuk perencanaan yang terpadu, dan saling mengintegrasikan sama lain sehingga tercipta penyusunan rencana pembangunan di daerah."

Mengenai tingkat koordinasi penulis mendapat jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

T A B E L III

TANGCAPAN RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI INSTANSI INSTANSI TERKAIT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN

| NO. | PENILAIAN | F | PERSENTASE |
|--------|---------------|----|------------|
| 1. | Sangat lancar | 10 | 33,33 |
| 2. | Cukup lancar | 16 | 53,33 |
| 3. | Kurang lancar | 4 | 13,33 |
| 4. | Tidak lancar | - | - |
| Jumlah | | 30 | 100 % |

Sumber : Hasil Wawancara Penulisan dengan Responden.

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 7 orang menyatakan hubungan kerja Bappeda dengan instansi vertikal sangat baik dan 16 yang menyatakan cukup lancar dan 4 orang yang menyatakan kurang lancar. Sedangkan tidak lancar tidak ada komentar.

Mengenai pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Tingkat II Sidrap, maka dibawa ini juga akan disajikan tabel hasil wawancara penulis dengan responden.

UNIVERSITAS
TABEL IV
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT PELAKSANAAN
RAPAT - RAPAT KOORDINASI

| NO. | PENILAIAN | F | PROSENTASE |
|--------|--------------|----|------------|
| 1. | Sangat Aktif | 7 | 23,33 |
| 2. | Cukup aktif | 19 | 63,33 |
| 3. | Kurang aktif | 4 | 13,33 |
| 4. | Tidak aktif | - | - |
| Jumlah | | 30 | 100 % |

Sumber : Hasil Wawancara Penulisan dengan Responden.

Dari tabel tersebut diatas diperoleh jawaban tentang tingkat pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

antara Bappeda Tingkat II Sidrap dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya. Dari tabel tersebut diperoleh jawaban bahwa tingkat pelaksanaan koordinasi sangat aktif 7 orang, dan 19 orang menyatakan cukup aktif, dan 4 orang yang mengakui bahwa rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda Tk II Sidenreng Rappang dengan instansi-instansi yang terkait kurang berhasil dan tidak aktif tidak ada yang mengakui.

C. Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung desentralisasi pembangunan di daerah melalui Kepres No. 27 tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 tahun 1980. Telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Tingkat I dan Tingkat II yang bertugas membantu gubernur/bupati/walikota/madya dalam menentukan kebijaksanaan dasar dibidang perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antara instansi vertikal dengan dinas daerah.

Disamping itu Bappeda melaksanakan "penilaian" atas pelaksanaan pembangunan di daerah Tingkat I dan II. Kedudukan Bappeda diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah No. 5 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal dan dinas daerah, serta instruksi Menteri Dalam negeri No. 18 tahun 1989

tentang petunjuk pelaksanaan.

Pola pelaksanaan pembangunan merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan di daerah. Bappeda ditugaskan menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah (PDPD), dan Rencana pembangunan Lima Tahun Daerah (REPELITADA), menyusun rencana pembangunan tahunan daerah (REPETADA) sesuai peraturan No. 9 tahun 1982 yang lebih dititik beratkan pada proses perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Melalui adanya sistem dan mekanisme perencanaan ini diharapkan kebutuhan masyarakat di daerah dapat diserasikan dengan kebijaksanaan pusat dengan daerah.

Namun demikian dalam kenyataan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh pembangunan yang datangnya dari pusat (bersifat top-down), sedangkan pembangunan yang datangnya dari bawah (bottom-up) masih kurang diperhatikan.

Oleh karena itu untuk menyeimbangkan antara pembangunan yang bersifat top-down dengan bottom-up sangat diperlukan adanya kemampuan yang lebih tinggi dari pihak aparaturnya pemerintah daerah, terutama Bappeda dalam menyusun rencana pembangunan yang bersifat komprehensif.

Bappeda Tingkat II Sidenreng yang dibentuk dan diatur

berdasarkan Perda No. 2 Tertanggal 25 Pebruari 1983 seri D. No. 2 yang dibentuk untuk memenuhi Kepres No. 27 tahun 1980, dan menyusun organisasinya berdasarkan petunjuk yang berlaku.

Bappeda merupakan badan perencanaan pembangunan di daerah yang mempunyai tugas membantu BKDH dalam menentukan, dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah tersebut.

Jadi Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Sebagai perencanaan pembangunan di daerah
- b. Sebagai pelaksanaan pembangunan
- c. Sebagai pengendali dalam pembangunan.

Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Pihak Bappeda harus mengenal lebih jauh keadaan dan kondisi daerah tersebut sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun jangka pendek benar-benar bermanfaat bagi masyarakat daerah bersangkutan. Sehingga masyarakat merasa terdorong berpartisipasi dalam pembangunan.

Karena pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu daerah tanpa partisipasi masyarakat tidak mungkin mencapai masyarakat adil dan

makmur

program pemangunan daerah oleh semua pihak yang bersangkutan.

Perencanaan merupakan hal yang sangat esensial yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan untuk menentukan apa yang harus dilaksanakan bagi semua petugas atau pekerja pelaksana. Maka didalamnya terdapat bagaimana cara melaksanakannya, kapan dilaksanakan, dimana dan siapa yang akan melaksanakannya.

Jadi perencanaan dilakukan sebelum terjun kepada sesuatu kegiatan, terlebih dahulu mengadakan perencanaan sebagai langkah pertama supaya apa yang diinginkan dapat tercapai.

Walaupun perencanaan telah dilakukan dengan matang ketidak ada partisipasi atau kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Semuanya itu tidak berjalan lancar.

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan baik guna mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk perencanaan. Maka dengan adanya perencanaan yang baik, sehingga penggunaan sumber-sumber pembangunan di daerah secara efisien dan efektif, serta mengakibatkan perubahan kearah modernisasi dan sosial masyarakat yang meningkat.

MC. Farlan, mendefinisikan perencanaan sebagai berikut : "Perencanaan adalah fungsi dimana pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh dari pada organisasi." 17)

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, maka perencanaan mutlak diperlukan. Oleh karena perencanaan adalah sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pembangunan daerah adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam tatanan negara kesatuan republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu tujuan pembangunan daerah sama dengan Pembangunan nasional yaitu untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang merata pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, maka Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menekankan bahwa :

"dalam rangka makin pemeratakan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pendesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan kedesaan, perkotaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak". 18)

Pembangunan daerah Tingkat II Sidenreng Rappang adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi manusia, agar mampu mengelola dan

disusun dalam program/proyek DIP dan DIPDA dalam menunjang sumber-sumber produksi diharapkan akan lebih terpadu, efisien dan efektif.

Bappeda selaku koordinasi dapat berperan dan menjamin agar instansi vertikal dan dinas daerah yang dikordinasikan dalam DURP, dan tentunya akan menghasilkan DIP yang lebih terarah dan terpadu.

Nampaknya potensi sumber daya pegawai yang ada pada Bappeda Tingkat II Sidrap mempunyai etos kerja yang dengan budaya bigis sebagai berikut :

"Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong, Pada Idi Pada Elo."

Terjemahan dari pepatah bugis di atas mengatakan bahwa kerjasama dan gotong royong yang dilandasi dengan kemauan bersama akan membawa keberhasilan yang baik.

Disamping itu kata "Resopa Temmangingngi namalomo naletei mammase Dewata.

Kemudian beberapa motivasi khusus dari pihak pemerintah daerah yang menjadi motivasi langsung yang juga merupakan kekuatan bagi aparat di daerah tingkat II Sidenreng Rappang yang dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai budaya tersebut tetap dijunjung tinggi dan dibudayakan dalam setiap usaha dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

Konsep Pengwilayahan komoditas yang disusun

Bappeda Tingkat II yang merupakan kesepakatan sektor dan dinas daerah yang dapat dipakai sebagai tata ruang Kabupaten dan sekaligus sebagai strategi dasar pembangunan di daerah dan tercantum dalam REPELITADA V belum bisa diterima oleh sektor. Karena masing-masing mempunyai kepentingan dan prioritas yang belum bisa terpadu dan sinkron dengan pembangunan daerah masing-masing.

Pengendalian seluruh kegiatan pembangunan di daerah pihak Bappeda masih sulit melakukannya sepenuh. Kesulitan data tentang semua DIP Proyek sektoral maupun DIP Proyek BUMN, karena masing-masing pimpinan proyek tidak berada di Kabupaten dan lebih senang berada di propinsi, dan Departemen di Jakarta. Sehingga kurangnya hubungan dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mulai dari proses sampai pelaksanaan bahkan berakhirnya proyek.

Masalah yang dihadapi Bappeda TK II Sidrap adalah masalah kepemimpinan aparatur Bappeda yang masih lemah, dalam hal ini kualitas, prakarsa dan kemandirian yang masih terbatas karena masih kurangnya kecakapan dalam ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi.

Kedewasaan dan kemandirian pemerintah daerah akan ditumbuhkan, sehingga mementum pembangunan dapat diambil oleh pemerintah daerah sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan kepemimpinan yang

Ibermutu akan dapat ditegakkan pemerintah dan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Sehingga pemerintah daerah akan dapat lebih berfungsi sesuai dengan keperluan pembangunan. Dengan demikian keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tingkat II Sidrap dalam memainkan peranannya sebagai badan perencana pembangunan dan sebagai lembaga koordinator yang bisa diandalkan dan berwibawa dan mampu menegakkan disiplin bagi instansi sektoral dan dinas-dinas daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda TK II Sidrap mengalami beberapa masalah antara lain :

1. Kurangnya persomil pada jabatan struktural, sehingga banyak pegawai merangkap jabatan terutama pada tingkat manajer bawah.
2. Bappeda Tingkat II Sidrap belum mempunyai tenaga ahli dibidang perencanaan, sehingga hanya menggunakan tenaga konsultan untuk mengatasi masalah perencanaan.
3. Bappeda Tingkat II Sidrap belum memiliki manajemen yang cukup iliah dentan kemampuan yang tinggi serta dasar informasi yang akurat dalam menyusun perencanaan.

Oleh karena bootom-up planning yang diharapkan, namun kurang berkembang masalahnya midle level management masih lemah. Pada tingkat manager Bappeda TK

II Sidrap kurang memiliki "leadership skill" dan "technical skill" yang memadai dalam pelaksanaan manajemen pembangunan. Sebaliknya ditingkat propinsi dan pusat memiliki orang yang terampil, bisa merencanakan sesuatu yang bisa merencanakan sesuatu yang bisa dilaksanakan, kemudian setelah menjadi policy dan strategi direncang di pusat dan selanjutnya turun ke Kabupaten yang terjadi adalah kelambanan. Karena perencanaan yang disusun itu kurang didukung data yang akurat, dan kurang mampu melihat potensi yang nyata yang ada di kabupaten yang bisa dikembangkan.

Untuk memingkatkan pembangunan daerah yang lebih maju peranan Bappeda harus lebih dikembangkan. Untuk menjamin mutu pekerjaan Bappeda, maka pimpinan dan anggotanya jangan hanya diambil dari orang-orang yang ada di daerah itu atau yang menjadi hasil lulusan perguruan tinggi daerah itu, tetapi pengangkatan karyawan Bappeda hendaklah berdasarkan atas kecakapan dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan manajemen. Karena bagaimanapun pelaksanaan dari tugas-tugas Bappeda sangat ditentukan oleh manajemen dan karyawannya.

Malaupun kedudukan Bappeda TK II sebagai pembantu Bupati Kepala Daerah TK II dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan di daerah telah dilengkapi dengan instrumen yang cukup tinggi. Seperti peraturan

pemerintah No. 6 tahun 1988 dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1982 tentang pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah yang biasa disebut (PSD), tetapi dalam kenyataannya lembaga ini belum mampu memainkan peranannya secara optimal. Mungkin saja timbul suatu pertanyaan "mengapa pihak Bappeda belum mampu berperan secara optimal" Tentu ini semuanya tergantung dari manusia yang ada dalam tubuh organisasi Bappeda dengan berbagai keterbatasannya.

Meskipun "pendelegasian" perencanaan pembangunan ini telah melembaga dalam Bappeda, namun dalam kenyataan memang masih tetap dirasakan belum penuh, hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Masih kuatnya peranan kantor wilayah di propinsi sebagai perencana dan penyelenggara kebijaksanaan dari pusat, sedang kantor departemen di Kabupaten Daerah Tingkat II tidak mempunyai wewenang perencanaan sektor pusat. Dan Bappeda TK II tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan vertikal dengan kantor wilayah sebagai pemegang kebijaksanaan pembangunan sektor di daerah.
2. Masih terkonsentrasikannya beban pekerjaan program dan pengambilan keputusan-keputusan pembangunan pada TK I atau tingkat pusat. Sedang Bappeda TK II sering terpaksa banyak menunggu, sehingga nampaknya Bappeda TK II kurang berhasil mengembang dirinya sebagai

lembaga perencana dan pengendali kegiatan pembangunan di daerah tingkat II.

Oleh karena itu untuk menyeimbangkan dan menyetarakan antara pembangunan daerah dengan pembangunan yang datangnya dari pusat, maka diperlukan adanya kemampuan yang lebih dari aparat pemerintah daerah tingkat II Sidenreng Rappang terutama dalam tanggap dalam melihat kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Bappeda TK II harus memainkan peranannya terutama dalam menyusun rencana pembangunan.

Dalam usaha mengatasi keterbatasan kemampuan aparatur daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan maka pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur daerah melalui penambahan tenaga tenaga terampil,
2. Meningkatkan pendidikan dan latihan bagi aparatur pemerintah daerah terutama dalam perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan pembangunan,
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam proses perencanaan misalnya alat pengolahan data (Komputerisasi) sarana dan transportasi dan lain-lain.

Dalam buku II bab 26 Repelita V ditegaskan bahwa :

"... amatlah penting untuk meningkatkan kemampuan aparat badan perencanaan yang di daerah. Bappeda TK I maupun TK II merupakan alat koordinasi dari berbagai sasaran dan kegiatan pembangunan di daerah pada tingkat perencanaan dan monitoring, Oleh karena kemampuan ini maka kekurangan tenaga personil yang dirasakan diberbagai Bappeda akan dipenuhi, selain itu latihan-latihan yang bersifat "on the job training" ditingkatkan." 19)

D. Peranan Bappeda Dalam Monitoring Pelaksanaan Rencana-Rencana Pembangunan.

Monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan atau pelaksanaan proyek/program di daerah Tingkat II Sidrap merupakan suatu kegiatan penting dalam perencanaan pembangunan di Daerah. maksudnya, agar proyek berjalan lancar dan tidak tersendat-sendat. Monitoring biasanya dilakukan oleh suatu tim di luar dari anggota pelaksanaan proyek. Maksudnya agar monitoring dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaruh dari yang melaksanakan proyek. Tim monitoring biasanya memeriksa kembali setiap aspek pada tahapan kegiatan proyek. Apakah parameter atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada DIP dilaksanakan dengan baik, atau asumsi-asumsi yang dipakai sudah benar atau belum. Sampai pada tahapan tertentu Tim monitor harus dapat memberikamn penerahan, dan juga memberikan rekomendasi apakah proyek tersebut dapat terus dilaksanakan atau tidak.

Bappeda sebagai badan staf Bupati, salah satu

fungsinya adalah memonitor pelaksanaan proyek/program pembangunan. Mengenai pelaksanaan monitoring yaitu melalui pemantuan di lapangan, dan rapat monitoring yaitu melalui pemantauan di lapangan, dan rapat monitoring yang diadakan setiap triwulan atau sekali sebelum. Mengingat semakin meningkatnya jumlah pembangunan yang diletakkan di daerah TK II Sidenreng Rappang, maka sistem monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah harus ditingkatkan pula dan semakin disempurnakan pula.

Tujuan dari sistem monitoring adalah :

1. Identifikasi bagi tindakan-tindakan korektif dalam pelaksanaan proyek/program pembangunan di daerah, sedapat mungkin dapat diatasi bila ada masalah,
2. Dengan monitoring dapat mendukung perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan sesuatu program/proyek pembangunan,
3. Monitoring bukan sekedar pelaporan, tetapi sistem untuk mengikuti pelaksanaan program/proyek pembangunan serta kemungkinan untuk pengambilan tindakan penyesuaian.

Pelaksanaan dari setiap program/proyek penguasaan daerah sering mengalami hambatan. Namun yang harus digaris bawahi bahwa, setiap hambatan apa dan bagaimana bentuknya harus dicari pemecahannya. Karena pada

hakekatnya hambatan dan masalah itu selalu ada dan harus dicari pemecahannya. Untuk menuju kearah tersebut dalam hubungannya dengan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang harus dilaksanakan monitoring, dalam hal ini dilakukan oleh pihak Bappeda atau badan yang mempunyai wewenang dalam hal tersebut.

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang seperti halnya Bappeda lainnya setiap tahun anggaran atau setiap pelita yang meliputi :

- a. Penyusunan rencana program,
- b. Melaksanakan program atau proyek,
- c. Mengendalikan program atau proyek.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan menjadi bagian tersendiri dari rangkaian kerja sirkuler mempengaruhi tercapainya sasaran yang direncanakan, dan dilaksanakannya suatu proses pembangunan. Kegiatan monitoring yang dimaksudkan untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan dari semua instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda TK II Sidrap akan terlihat perkembangan pelaksanaannya dan alternatif pemecahannya. Selanjutnya hasil monitoring yang telah dilakukan oleh Bappeda TK II Sidrap dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah, ataupun kepada tingkat yang lebih tinggi untuk

dijadikan bahan pemikiran dan penentuan kebijaksanaan perbaikannya.

Dalam rangka monitoring tersebut yang dipimpin oleh Ketua Bappeda Tingkat II Sidrap atau yang diberikan kewenangan (authoriti). Dimana yang diundang adalah semua Kepala instansi vertikal dan dinas daerah yang ada proyeknya. Hal ini mereka laporkan perkembangan pelaksanaannya masing-masing program/proyek dari berbagai sumber pembiayaan baik yang dibiayai oleh dana sektoral (APBN) murni, APBD TK I, dan APBD TK II INPRES dan realisasi fisiknya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan yang dihadapi pada saat sekarang ini, sulit untuk dihindari. Oleh karena itu didalam rapat monitoring dilaporkan semua hambatan yang dialami, kemudian dibahas secara bersama-sama alternatif pemecahannya.

Pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan oleh Bappeda TK II Sidrap sudah menjadi program yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dengan responden dalam hal ini Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Kantor Bappeda TK II Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

"Bahwa setiap peninjauan langsung ke lapangan (lokasi proyek) dilakukan oleh Bappeda TK II Sidrap bersama dengan bagian pembangunan pada Kantor Bupati Kepala Daerah. Pada waktu

peninjauan kelokasi proyek dilakukan konsultasi dengan pejabat di Kecamatan, atau desa/keseluruhan bahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan." 20)

Keuntungan monitoring ialah :

1. Dengan monitoring didapatkan input dari masyarakat tentang pelaksanaan proyek pembangunan, hambatan-hambatan apa yang dialami, dan jika mungkin cara untuk mengatasinya,
2. Dengan monitoring dapat dilihat perkembangan pelaksanaan program/proyek pembangunan sekaligus dapat menjadi forum diskusi untuk penyusunan usulan proyek pembangunan tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis responden terhadap pemberian informasi dan laporan yang diberikan oleh Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya dalam pelaksanaan dan monitoring, hal ini Bapak Kepala bidang pendataan dan Pelaporan yaitu Bapak Drs. Muh. Yunus mengatakan bahwa :

1. Penyampaian jumlah dana perinstansi yaitu penyampaiannya dilakukan pada bulan Mei, sebagai bahan probasi diperoleh dari Tingkat I,
2. Pengalokasian proyek yaitu proyek yang telah disetujui oleh Tingkat Propinsi/tingkat atas,
3. Pemberian saran tindak setiap kendala yaitu setiap masalah proyek/program yang diangkat pada rapat monitoring diarahkan kepada pinpro dan pelaksana

proyek/program terhadap langkah-langkah yang seharusnya ditempuh,

4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, yaitu semua pelaksanaan proyek disampaikan oleh pinpro diinventarisir, kemudian dievaluasi untuk ditentukan pemecahannya. Dan setiap kendala yang menjadi wewenang Tingkat II diangkat dalam rapat monitoring ditingkat II diangkat pada rapat monitoring di Tingkat I.

Untuk mencapai hasil yang optimal sesuai apa yang diinginkan, maka dalam pelaksanaan proyek/program pembangunan harus diperhatikan dengan memonitor kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan proyek di lapangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pada proyek pembangunan daerah adalah :

1. Adanya Sistem Pelaporan

Data-data yang diperlukan dalam laporan pada umumnya adalah pelaksanaan management, pencapaian sasaran fungsional atau sering disebut pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini dapat dibagi atas yang diperlukan untuk penyesuaian pelaksanaan yang bersifat khusus proyek tersebut, dan data yang bersifat institusional pelaksanaan proyek pada umumnya/ Mengenai data-data untuk keperluan perencanaan berikutnya merupakan kelemahan, tetapi juga untuk hal-hal yang memerlukan cara-cara yang

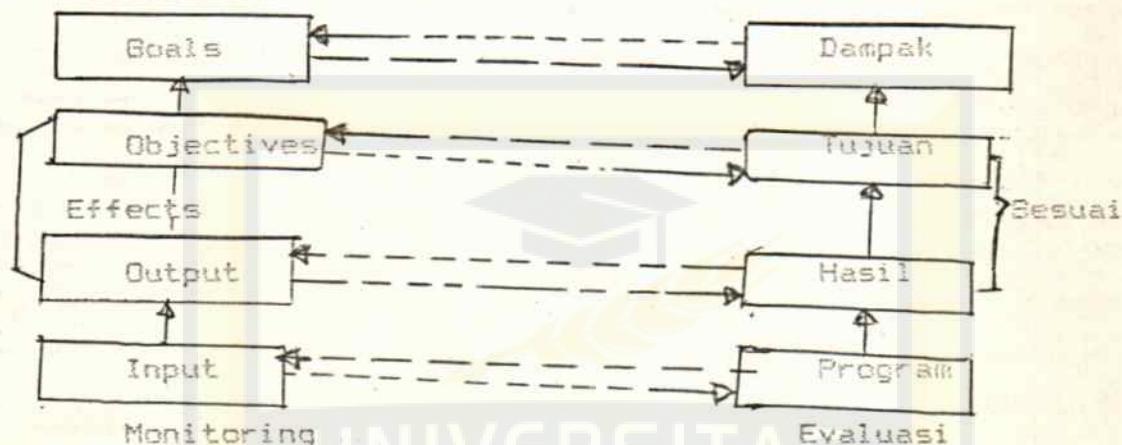
berhasil. Pelaporan dapat diusahakan secara menyeluruh untuk semua program pembangunan, tetapi juga bisa diproses secara selektif pada program/proyek yang penting berdasarkan kriteria yang penting dan tertentu. Jangka waktu laporan dapat bernagai macam, tetapi pada umumnya jangka waktu triwulan dianggap memadai. Karena tidak terlalu sering, tetapi juga tidak terlalu jarang.

2. Adanya saluran informasi serta pusat-pusat monitoring dan pemeroses data

Laporan bisa datang bagi proyek-proyek masing-masing. Dari Departemen untuk proyek nasional, dari badan luar negeri, dan dari pemerintah daerah atau Bappeda mengenai proyek-proyek secara keseluruhan. Dengan cara ini memungkinkan menerima data-data dan informasi secara langsung serta dapat dicek. Kemudian data-data dan informasi perlu diproses dalam bentuk yang lebih sesuai dengan data pengambilan keputusan korektif. Dari kegiatan monitoring yang diselenggarakan didapatkan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Hasil pelaporan itu kemudian dicek dengan laporan-laporan lain yang diperoleh secara langsung dari yang bersangkutan.

Pada bagian ini juga akan dibahas sedikit tentang pengertian evaluasi yang dapat membedakan dengan monitoring. Perbedaan terhadap kegiatan monitoring

dengan evaluasi dapat dibedakan menurut hirarkinya masing-masing. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar 7 dibawah ini.



Gambar 7. Kaitan Antara masing-masing variabel yang biasanya membedakan antara monitoring dan evaluasi.
Sumber : Prinsip Dasar Perencanaan pembangunan, Dr. Soekawita.

Dari gambar tersebut diatas jelas terlihat adanya suatu perbedaan antara monitoring dan evaluasi berdasarkan pada fungsi dan pelaksanaannya terhadap pekerjaan masing-masing kegiatan baik pada kegiatan monitoring maupun evaluasi. Seperti contoh, proyek irigasi tersier di suatu daerah. Kegiatan monitoring dapat berupa memonitor apakah input yang selama ini diberikan telah memberikan hasil, kemudian apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan tujuan (Objectives) yang telah ditetapkan. Juga apakah sesuai dengan goals yang diinginkan. Kalau goalnya "untuk menunjang pencapaian swasembada beras" maka objectives-nya dapat berupa "peningkatan produksi padi sebanyak mungkin atau sesuai jumlah tertentu, misalnya 3 % dalam setiap tahun. "Output-nya dapat berupa berapa panjang

seluruh tersier yang telah dibangun: sedangkan inputnya berupa berapa jumlah sumberdaya (tenaga kerja untuk membangun saluran tersier tersebut) dan sumber dana. Antar out-put dan objectives biasanya juga perlu diukur besarnya effects (pengaruh) yang dihasilkan terhadap output tersebut, Misalnya, dengan selesainya proyek tersebut, apakah sudah dapat menaikkan produksi sebesar 3 % pertahun seperti yang diharapkan atau belum.

Sedangkan kegiatan evaluasi sudah menjurus untuk memilai hasil akhir dapat proyek, apakah hasil akhir dari proyek sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian perlu dilihat sejauh mana proyek memberikan manfaat baik sosial maupun secara ekonomi. Penilaian ini sering disebut penilaian dampak dari suatu proyek/program.

Saran dari tim monitoring biasanya menakup dua hal yaitu :

- a. Apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya secara realistis apakah proyek/program dapat dilaksanakan dengan memberikan keuntungan atau tidak,
- b. Apakah pinpro dapat melakukan penyesuaian (adjustment) atau tidak terhadap segala perubahan yang terjadi manakalah ada sesuatu hal yang terpaksa agak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan proyek oleh yang

berwenang dapat dilakukan dengan dua cara :

- a. Pengawasan "melakat" (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Jadi lebih banyak bersifat pengawasan intern dalam instansi atau dinas yang bersangkutan.
- b. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh atasan, tetapi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tugasnya memang mengawasi suatu kegiatan- proyek-proyek pembangunan. Lembaga ini bukan lembaga intern dari instansi atau dinas yang bersangkutan. Pengawasan yang tidak melekat ini, misalnya dilakukan oleh :
 - Kantor inspektorat,
 - Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP).
 - Badan pengawas kauengan (BPK).

T A B E L I V
TANGGAPAN INSTANSI TERKAIT TERHADAP BAPPEDA DALAM
MEMONITOR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

| NO. | PENILAIAN | F | PROSENTASE |
|-------------|-------------|----|------------|
| 1. | Sangat baik | 12 | 40 |
| 2. | Cukup baik | 14 | 46,66 |
| 3. | Kurang baik | 4 | 13,33 |
| 4. | Tidak baik | - | - - |
| J u m l a h | | 30 | 100 % |

Sumber : Hasil wawancara Penulis dengan responden, 1990

Berdasarkan dari tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa dari 30 responden yang penulis wawancarai sekitar masalah ini, dimana 12 orang yang menyatakan bahwa Bappeda TK II Sidenreng Rappang dalam memonitor pelaksanaan pembangunan sangat baik, dan 14 orang yang menyatakan cukup baik dan 4 orang yang menyatakan kurang baik dan penilaian yang tidak baik tidak ada jawaban.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden penilaian tertinggi adalah 46,66 % dan 13,33 % adalah penilaian kurang baik/rendah. Keterangan yang diperoleh dari pihak Bappeda TK II Sidenreng Rappang bahwa, dalam pelaksanaan monitoring pihak Bappeda kekurangan sarana transportasi sehingga mengalami kesulitan kelengkapan. Monitoring dan evaluasi adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Monitoring dan evaluasi berguna mendapatkan umpan balik

KESIMPULAN DAN SARAN SARAN.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian tentang "peranan Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang" pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang adalah sebagai tindak lanjut dari Kepres No. 27 tahun 1980, dengan surat keputusan menteri dalam negeri No. 195/1980 dan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang No. 5 tahun 1982 "Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda TK II Sidenreng Rappang". Adapun tugas dan fungsi Bappeda TK II Sidenreng Rappang sesuai Kepres Nom 27 tahun 1980 adalah :

- Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah (PDPD)
- Menyusun rencana program-program tahunan,
- Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
- Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah,
- Melakukan koordinasi perencanaan antara instansi vertikal dan dinas-dinas daerah,

- Memonitor pelaksanaan pembangunan,
- Dan lain-lain.

2. Sistem atau mekanisme perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda TK II Sidenreng Rappang dalam penyesunan perencanaan adalah sistem perencanaan dari atas ke bawah (Top-down planning) dan sistem perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning), namun sistem bottom-up planning dirasakan masih kurang/lemah.

3. Hubungan kerja antar Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya dalam koordinasi yang baik khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan cukup baik.

4. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang antara lain :

a. Faktor yang menunjang adalah :

- Seluruh pemerintah daerah TK II Sidrap,
- Pimpinan Bappeda dan seluruh stafnya,
- Partisipasi instansi terkait dan dinas-dinas daerah Tik II Sidrap, dan seluruh masyarakat Sidenreng Rappang :

b. Faktor faktor yang menghambat antara lain :

- Kurangnya tenaga ahli dalam bidang perencanaan, terutama perencanaan kota (planologi),
- Terbatasnya faktor biaya/dana dalam

pembangunan,
- Pendapatan masyarakat Sidrap yang relatif masih rendah.

5. Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka pihak Bappeda menggunakan seorang tenaga konsultan yang telah memiliki keahlian khusus dalam perencanaan untuk membantu program pengembangan manajemen di daerah.

B. Saran-Saran

1. Dengan melihat kuantitas maupun kualitas personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TK II Sidrap, maka diperlukan adanya program pengembangan dan pembinaan manajemen, dan peningkatan kemampuan profesionalisme dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Oleh karena mekanisme perencanaan yang digunakan oleh Bappeda TK II Sidrap dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah sistem perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, maka bappeda TK II Sidrap diharapkan tanggap dalam memahami aspirasi masyarakat dengan melihat potensi yang ada maupun sumber-sumber yang tersedia dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah.

3. Untuk menuju koordinasi yang baik antara Bappeda dengan instansi yang terkasait, diperlukan adanya penegasan terhadap setiap kepala-kepala instansi dalam keikutsertaannya pada setiap rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Bappeda diharapkan meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil Bappeda, dan meningkatkan sarannya terutama sarana transportasi dan pengolahan data, diharapkan pula dalam pengisian suatu jabatan disesuaikan dengan prinsip "the right man on the right place."

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Handayaniingrat Soewarno Drs, dan Bindratmo R. Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa, Penerbit SV. Masagung.
2. Jono Wiryanto P, Membangun Masyarakat Desa, Penerbit Alumni, 1986, Bandung.
3. Moekijat Drs, Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1987.
4. -----, Pengawasan Efektif, Penerbit Pioner Jaya Bandung, 1987.
5. Riggs Fred W, Administrasi pembangunan, Penerbit CV. Rajawali Jakarta, 1986.
6. Surjadi A. MA. PH.D, Pembangunan Masyarakat Desa, Penerbit Mandar Maju Bandung, 1987.
7. Soekartiwi Dr., Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan, Penerbit Rajawali Pers Jakarta, 1990.
8. Sujanto Ir, Cakrawala Otonomi Daerah, Penerbit Sinar Grafika, 1988.
9. -----, Otonomi Daerah, Penerbit Chalia Indonesia, 1984.
10. -----, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, 1989.
11. Soejito Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerbit Bina Aksara, 1986.
12. Supriyono R.A. DR. SU, Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintah Indonesia, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1990.
13. Timbergen Jen, Rencana Pembangunan, Penerbit Universitas Indonesia, 1987.
14. Todaro Michael P, Perencanaan Pembangunan, Penerbit Intermedia, 1986.
15. Tjokroamidjojo Bintoro Prof. MA, Perencanaan Pembangunan, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1986.
16. -----, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, LP3S, 1984.

B. DIKTAT-DIKTAT

1. Amam H.M. Tjedi, Proses Perencanaan, FISIP UNHAS, 1988.
2. Batinggi Achmad Drs. MPA, Bunga Rampai Perbandingan Administrasi, FISIP UNHAS.
3. Gani M. Alwi Drs, Administrasi Negara, APDN Ujung Pandang, 1990.
4. Maulana H. Dahlan Drs. MS, dan Mardamas Nakhurddin Dasar-dasar perencanaan Pembangunan Regional, APDN Ujung Pandang, 1990.
5. Suchsiah Andi Drs. Administrasi Pembangunan, APDN, Ujung Pandang, 1990.
6. Said Muhammad Drs. Teori Administrasi negara, FISIP, UNHAS, Ujung Pandang, 1990.
7. Sujadi Drs. Organisasi dan Metode,

C. PERATURAN-PERATURAN

1. Kepres no. 27 tahun 1980
2. undang undang no. 5 tahun 1974
3. undang undang dasar 1945
4. PERMENDAGRI NO. 185 Tahun 1980
5. PERDA TK II SIDRAP No. 5 Tahun 1982.

DAFTAR PERTANYAAN
Untuk Bappeda Tk II Sidenreng Rappang

1. Sebagaimana mekanisme kerja antara Bappeda dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya ?
2. Bagaimana proses dan cara mengumpulkan data yang ditempuh/dilakukan oleh Bappeda untuk perencanaan ?
 - a. Penelitian sendiri.
 - b. Minta laporan dari instansi-instansi yang terkait.
3. Bagaimana cara menyesuaikan data-data atau laporan dari instansi yang bersangkutan ?
4. Berapa jumlah dan kualifikasi pegawai dibidang perencanaan pembangunan dan pengolahan data ?
 - a. Memadai,
 - b. Kurang Memadai,
 - c. Tidak memadai.Kalau kurang memadai apa yang menyebabkan ?
.....
5. Siapa yang mengumpulkan data untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah ?
 - a. instansi vertikal,
 - b. bappeda dan instansi vertikal ?
6. Data apa saja yang tersedia dan lengkap untuk perencanaan pembangunan daerah ?
.....
7. Apakah data itu sudah tersedia ?
Kalau tidak tersedia apa yang menyebabkan ?

DAFTAR PERTANYAAN

UNTUK BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDRAP

1. Bagaimana penilaian Bapak Bupati terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bappeda, khususnya dalam koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan ?
2. Bagaimana pendapat Bapak Bupati tentang partisipasi instansi vertikal dan dinas daerah dalam penyusunan rencana -rencana yang dikordinasi oleh Bappeda Sidrap ?
3. Bagaimana pendapat tentang pengolahan data dan tersedianya data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan ?
4. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan personil daerah dalam pelaksanaan pembangunan ?
5. Bagaimana/siapa yang menentukan kebijaksanaan dasar dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidrap ?
6. Bagaimana mekanisme kerja antara Bupati dengan Bappeda dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan ?
7. Menurut pendapat Bapak bagaimana strategi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidrap ?
8. Bagaimana proses perencanaan pembangunan sebelum dan sesudah Kepres No. 27 Tahun 1980 ?
9. Bagaimana pendapat Bapak tentang mekanisme kerja Bappeda dengan instansi terkait ?
10. Bagaimana pendapat Bapak tentang partisipasi masyarakat ?

DAFTAR PERTANYAAN

UNTUK INSTANSI VERTIKAL/DINAS-DINAS DAERAH

1. Bagaimana mekanisme kerja antara Bappeda dengan instansi vertikal atau dinas daerah yang terkait ?
2. Bagaimana koordinasi antara Bappeda dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah lainnya ?
3. Bagaimana menyesuaikan data-data atau laporan dari instansi yang terkait dengan Bappeda ?
4. Kesulitan-kesulitan apa yang dialami dan dihadapi oleh instansi vertikal dengan bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidrap ?
5. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan personil daerah dalam perencanaan pembangunan daerah ?
6. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Sidrap ?
7. Menurut pendapat Bapak terdapat kendala apa/masalah apa yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
8. Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah tersebut ?
9. Bagaimana pendapat bapak tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang

TABEL

REALISASI PENELUARAN PEMBANGUNAN DATI II SIDRAP

TAHUN ANGGARAN 1983 S/D 1988 (000)

| NO. | PERINCIAN | 1983/1984 | 1984/1985 | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | KETERANGAN |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Sektor pertanian dan pengairan | 2.333 | 19.555 | 7.847 | 10.294 | 18.624 | - |
| 2. | Sektor Industri | - | 5.580 | - | - | - | - |
| 3. | Sektor pertambangan dan energi | 3.926 | 8.580 | 16.429 | 11.429 | 18.101 | - |
| 4. | Sektor perhubungan dan pariwisata | 8.284 | - | 27.354 | 1.000 | 77.560 | - |
| 5. | Sektor Perdagangan dan Koperasi | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Sektor tenaga Kerja dan Pemukiman | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Sektor pembangunan daerah | - | 11.399 | 5.955 | 5.262 | 6.093 | - |
| 8. | Sektor Agama | 12.911 | 21.982 | 10.986 | 15.512 | 16.270 | - |
| 9. | Sektor pendidikan generasi muda, kebudayaan nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. | 38.510 | 128.154 | 91.207 | 71.662 | 33.605 | - |
| 10. | Sektor Kesehatan dan kesejahteraan, peranan Wanita, pendudukan KB | 14.965 | 4.770 | 4.921 | 5.934 | 7.500 | - |
| 11. | Sektor perumahan dan pemukiman | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Sektor hukum | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Sektor keamanan dan ketertiban | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Sektor penerangan pers dan komunikasi | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Sektor Ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Sektor peraturan pemerintah | 15.750 | 5.060 | 20.600 | 8.500 | 8.500 | - |
| 17. | Sektor pengembangan dunia usaha | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Sektor sumber alam dan lingkungan hidup | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Subsidi/bantuan pembangunan Daerah bawahan | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Pembayaran ken. | 57.200 | 13.300 | - | - | 25.000 | - |
| Jumlah | | 103.864 | 415.933 | 582.283 | 202.887 | 345.160 | - |

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.

TABEL : PELAKSANAAN PROYEK INPRES, APBD. TK. I DAN APBD TK. II
TAHUN ANGGARAN 1989/1990 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDENRENG RAPPANG

| NO. | NAMA PROYEK | JUMLAH PROYEK | BIAYA (Rp) | PROSENTASE | | KETERANGAN |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|----------|------------|
| | | | | FISIK | KEUANGAN | |
| 1. | PROYEK INPRES BANTUAN DATI II | 13 | 337.347.00 | 100 % | 100 % | |
| 2. | PROYEK INPRES PENDINGK* JAN JALAN (USAID) | 5 | 932.140.000 | 100 % | 199 % | |
| 3. | PROYEK INPRES BANTUAN SEKOLAH DASAR | 13 | 142.160.800 | 100 % | 100 % | |
| 4. | PROYEK INPRES BANTUAN SARANA KESEHATAN | 10 | 17.638.274 | 100% | 100 % | |
| 5. | PROYEK APBD TK I SULAWE S1 SELATAN | 3 | 60.000.000 | 100 % | 100 % | |
| 6. | PROYEK APBD TK II | 15 | | 100 % | 100 % | |
| J U M L A H | | 59 | 1.411.647.800 | 100 % | 100 % | |

SUMBER : BAPPEDA TK II SIDENRENG RAPPANG

TABEL : PELAKSANAAN PROYEK IMPRES BANTUAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1984 S/d 1989 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

| No. | Tahun Anggaran | Jenis Proyek | Jumlah proyek | Biaya | Volume Fisik | Pelaksanaan | Keterangan |
|----------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 1984/1985 | - Perbaikan puskesmas. | 12 | 66.841.000 | 445 buah | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | - Perluasan puskesmas. | | | | | |
| | | - Pembangunan rumah para medis. | | | | | |
| | | - Pembangunan sarana Kesehatan. | | | | | |
| 2. | 1985/1986 | - Perbaikan puskesmas | 11 | 80.829.000 | 225 buah | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | - Perluasan puskesmas | | | | | |
| | | - Pembangunan Sarana | | | | | |
| | | - Pembangunan rumah Dokter. | | | | | |
| 3. | 1986/1987 | - Perbaikan puskesmas | 10 | 59.352.540 | 58 buah | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | - Perluasan puskesmas | | | | | |
| | | - Pembangunan sarana kesehatan | | | | | |
| | | - Perbaikan puskesmas | | | | | |
| 4. | 1987/1988 | - Biaya operasional PKM. | 2 | 3.595.000 | - | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | - Perbaikan puskesmas | | | | | |
| 5. | 1988/1989 | - Perbaikan puskesmas keliling. | 2 | 1.000.000 | 1 buah | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | - Perbaikan puskesmas | | | | | |
| Jumlah : | | | 37 | 211.417.540 | 1728 buah | | |

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidrap
Bagian Pembangunan.

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG

| No. | Tahun Anggaran | Jenis proyek | Jumlah proyek | Biaya (Rp) | Volume fisik | Pelaksana | Keterangan |
|----------|----------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. | 1984/1985 | Proyek air minum (perpipaan) | 1 | 35.480.000 | 600 m ² | CV. Madras | |
| 2. | 1985/1986 | Pembuatan jalan kri-kil | 1 | 45.000.000 | 350.000.000 m ³ bh | CV, Sijingingge | |
| 3. | 1986/1987 | Rehabilitasi waduk Takkalasi | 1 | 30.000.000 | - | CV. Karya bersama | |
| 4. | 1987/1988 | Pembuatan jalan kri-kil | 1 | 45.000.000 | 3.000 mx4 + 1 buah jembatan permanen | CV. Sijingingge | |
| 5. | 1988/1989 | Pembuatan jalan kri-kil | 2 | 67.500.000 | 3.000 m ³ | CV. Sijingingge | |
| | | Rehabilitasi Bendung | 2 | | 1263 M ³ | CV. Datuwata-lipu. | |
| Jumlah : | | | | 216.980.000 | | | |

Sumber : Kantor Bupati TK II
Bagian Pembangunan.

TABEL : REALISASI PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK/PROGRAM INPRES PELITA IV

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG

| NO. | NAMA ANGGARAN | T A H U N A N G G A R A N G | | | | | | | | | | JUNLAH PROYEK | JUNLAH DANA | KET. |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|------------------|----------------|------|
| | | 1984/1985 | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | JP | JP | JP | JP | JP | | | |
| I. | BANTUAN DATI I JANG JAKAN | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | | | | | | 48 | 1.475.855.000 | |
| II. | BANTUAN PENUN- JANG JAKAN | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | | | | 14 | 1.503.360.000 | |
| III. | BANTUAN KESEHA- TAN | 445 | 225 | 58 | 2 | 3 | | | | | | 14.546 | 407.658.540 | |
| IV. | BANTUAN PEMBA- NGUNAN DESA | 278 | 182 | 135 | 90 | 32 | | | | | | 717 | 305.770.000 | |
| V. | BANTUAN DATI II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 225.480.000 | |
| VI. | BANTUAN PENGHI- | 4 | 12 | 10 | 9 | 11 | | | | | | 58 | 324.456.000 | |
| VII. | DINAS PERTANIAN | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | | 17 | 350.220.000 | |
| J U M L A H : | | 755 | 479 | 217 | 119 | 63 | | | | | | 15.405 | 4.592.799.540 | |

SUMBER : BAPPEDA TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG

TABEL : PELAKSANAAN PROYEK INFRES BANTUAN PENUNJANG JALAN
TAHUN 1984 s/d 1989 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

| No. | Tahun Anggaran | Jenis Proyek | Jumlah Proyek | Biaya (Rp) | Volume Fisik | Pelaksana | Keterangan |
|--------|----------------|---|---------------|----------------|---|---------------------------------|------------|
| 1. | 1984/1985 | -Pengkrikilan Jalan - Pengaspalan jalan | 2 | 229.680.000 | 28.300 m !Jembatan 6 buah | !Dinas PUD. !CV. Wira Bakti. | ! |
| 2. | 1985/1986 | - Pengkrikilan jalan - Pengaspalan jalan - Pembuatan Jembatan | 3 | 95.000.000 | 28.300m !Gorong-go-rong 10 bh. Jembatan 6bh. !Gorong 27 buah | !CV, Karya Bersama. | ! |
| 3. | 1986/1987 | - Pengkrikilan jalan - Pembuatan jalan baru | 2 | 110.000.000 | 9.000 m | ! Dinas PUD. | ! |
| 4. | 1987/1988 | - Pengkrikilan jalan | 5 | 339.000.000 | 22.075 m !Jembatan 8 buah. Gorong-go-rong 27 bh. | ! CV.Wira Buana | ! |
| 5. | 1988/1989 | - Peningkatan jalan | 1 | 594.000.000 | 12,6 km | !PT. Sumber Rejeki Utama | ! |
| Jumlah | | | | 15.771.180.000 | | | ! |

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah TK II
Bagian Pembangunan.



DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG.
PADA PELITA IV

| NO. ! | MATA ANGGARAN ! | JUMLAH BIAYA ! | | REALISASI ! | | KETERANGAN ! |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|
| | | (RP) ! | (Rp) ! | Rupiah ! | % KU. ! | |
| I. | BANTUAN LUAR NEGERI ! | 2.265.114.452,48 ! | 2.745.310.000 ! | 24,45 % ! | 54745-% | |
| | - P.U.Bina Marga ! | 22.440.000,- ! | 16.630.000 ! | 75 % ! | | |
| | - P.U.Pengairan ! | 341.031.000 ! | 323.979.350 ! | 95 % ! | | |
| | - P.U.Cipta Karya ! | 3.588.761.425 ! | 3.587.767.425 ! | 44,52% ! | | |
| | - Dinas Kesehatan ! | 11.876.000 ! | 11.282.200 ! | 95 % ! | | |
| II. | SEKTORAL (APBN) ! | 492.778.700 ! | 485.229.925,- ! | 92,62% ! | | |
| | - Dinas Pertanian ! | 19.708.200 ! | 19.908.200 ! | 100 % ! | | |
| | - Tanaman pangan ! | 317.752.000 ! | 317.708.000 ! | 100 % ! | | |
| | - Dep. Pert.&Energi ! | 1.792.250 ! | 1.792.250 ! | 100 % ! | | |
| | - Dep. Prindustrian ! | 51.715.750 ! | 51.715.750 ! | 100 % ! | | |
| | - Dep.Pendidikan ! | 176.000 ! | 176.000 ! | 100 % ! | | |
| | - dan Kebudayaan. ! | | | | | |
| | - Dep.Sosial ! | | | | | |
| | - Dep.Pekerjaan.Um. ! | | | | | |
| | - A. BPAM. ! | 39.148.000 ! | 39.148.000 ! | 100 % ! | | |
| | * B.P.U.CMpta Karya ! | 63.486.500 ! | 54.947.725 ! | 99,98 % ! | | |
| III. | APBD-I- ! | 690.257.995,- ! | 555.309.321,5 ! | 80 % ! | | |
| | -Dinas pertanian ! | 11.841.125 ! | 10.749.875 ! | 90 % ! | | |
| | - tanaman pangan ! | 136.317.375 ! | 68.017.982 ! | 49 % ! | | |
| | -Dinas Perkebunan ! | 13.761.495 ! | 13.200.377 ! | 99,92% ! | | |
| | -Dinas peternakan ! | 11.895.000 ! | 11.895.000 ! | 100 % ! | | |
| | -Dinas Prikaman ! | 281.660.000 ! | 279.537.657,5 ! | 99 % ! | | |
| | -P.U. Bina Marga ! | 184.153.000 ! | 184.148.250 ! | 99 % ! | | |
| | -P.U. Pencairan ! | 45.000.000 ! | 44.830.000 ! | 99 % ! | | |
| | -Bantuan Dae. bawahan ! | | | | | |

TABEL : PERKEMBANGAN KEUANGAN DAN FISIK PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDENRENG RAPPANG

PADA PELITA IV

| NO. ! | MATA ANGGARAN ! | JUMLAH BIAYA ! | REALISASI KEUANGAN ! | % KU. ! | KETERANGAN ! |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------|
| ! | ! | ! | RUPIAH ! | ! | ! |
| IV. ! | INPRES----- ! | 978.972.072 ----- ! | 925.115.672 ----- ! | 94,49% ! | ! |
| ! | -Inpres Bantuan Dati I ! | 285.682.000 ! | 265.682.000 ! | 100 % ! | ! |
| ! | -Inpres Penunjang- Jalan dan Jembatan ! | 317.095.000 ! | 417.095.000 ! | 100 % ! | ! |
| ! | -Inpres Bantuan Sekolah Dasar ! | 133.561.000 ! | 133.561.000 ! | 100 % ! | ! |
| ! | -Inpres Bantuan Para- na Kesehatan ! | 94.917.000 ! | 94.917.000 ! | 100 % ! | ! |
| ! | -Inpres Bantuan Pem- angunan Desa ! | 57.880.000 ! | 57.880.000 ! | 100 % ! | ! |
| ! | -Inpres Penghijauan ! | 28.698.000 ! | 28.698.000 ! | 100 % ! | ! |
| J U M L A H : | | 6,128.123.219,48 ! | 5.710.975.766 ! | 93.17% ! | ! |

DAFTAR USULAN PROYEK TAHUN ANGGARAN 1990/1991

I N P R E S

| No. ! | I N P R E S | ! | J U M L A H P R O Y E K (B U A H) | ! | J U M L A H D A N A (R p) | 0 0 0 | ! | K E T E R A N G A N |
|-------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------|---|---------------------|
| 1. | ! I N P R E S B A N T U A N D A T I I | ! | 11 | ! | 369 | | ! | |
| 2. | ! I N P R E S P E N I N G K A T A N J A L A N | ! | 4 | ! | 2.015.0 | | ! | |
| 3. | ! I N P R E S K E S E H A T A N | ! | 4 | ! | 142.623 | | ! | |
| 4. | ! I N P R E S S E K O L A H D A S A R | ! | 4 | ! | 135.3 | | ! | |
| 5. | ! I N P R E S R E B O I S A S I D A N | ! | 2 | ! | 241.165 | | ! | |
| | ! P E N G H I J A U A N | ! | | ! | | | ! | |
| 6. | ! I N P R E S B A N T U A N D E S A | ! | 1 | ! | 61.325 | | ! | |
| | | | J U M L A H : | ! | 26 | ! | ! | 2.982.413.9 |

Sumber : KANTOR BUPATI KEPALA DAERAH TK II SIDRAP
BAGIAN PEMBANGUNAN

I N P R E S

No. : I N P R E S ! Jumlah Proyek (buah) ! Jumlah Dana (Rp) 000 ! Keterangan

| | | |
|---------------------------------|------|------------|
| 1. ! INPRES BANTUAN DATI I ! | 30 ! | 967.50 ! |
| 2. ! INPRES PENINGKATAN JALAN ! | 9 ! | 5.390 ! |
| 3. ! INPRES KESEHATAN ! | 15 ! | 310.50 ! |
| 4. ! INPRES SEKOLAH DASAR ! | 9 ! | 872.90 ! |
| 5. ! INPRES BANTUAN DESA ! | 5 ! | 117.20 ! |
| 6. ! INPRES REBOISASI DAN ! | 2 ! | 235.51 ! |
| ! PENGHIJAUAN ! | ! ! | ! ! |
| J U M L A H ! | 70 ! | 7.891.81 ! |

SUMBER : KANTOR BAPPEDA TK II SIDRAP.